

-POLITICAL LEADER #1

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

ISLAM

KEBANGKITAN ISLAM POLITIK PASCA ORDE BARU:

Studi Deskripsi Pada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo

SKRIPSI



Oleh :

**AHMAD FIRDAUSI
NIM. 070016168**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2005/2006**



KEBANGKITAN ISLAM POLITIK PASCA ORDE BARU:

Studi Deskripsi Pada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Studi Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Oleh :

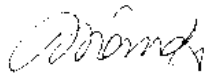
**AHMAD FIRDAUSI
NIM. 070016168**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2005/2006**

Halaman Persetujuan

Skripsi ini setuju untuk diujikan.
Surabaya, 16 Juni 2006

Dosen Pembimbing



Drs. Priyatmoko, MA
NIP. 130.937.952



Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juli 2006
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang 250

Dewan Penguji terdiri dari:

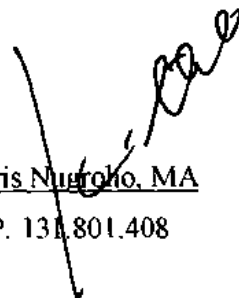
Ketua,



Anggota,


Drs. Priyatmoko, MA
NIP. 130.937.952

Anggota,


Drs. Kris Nugroho, MA
NIP. 131.801.408



Persembahkan:

*Untuk Orang Tua Tercinta,
H. Ali Mansur dan Hj. Lilik Badjuri
Alfi Rosidah, SE dan Erwin Setiadi, SE
Ir. H. Ahmad Andi dan Nur Laili Indafa'a, ST
Muhammad Ridlo'i dan Crew Acta Surya
"Bintang Kecil"-ku Nabilah Ali dan Aldiansyah
Keluarga Mustajab dan Sutini*

Baitii Jannatii...

Kata Pengantar

Tugas penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu wajib bagi penulis untuk mengungkapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah, Tuhan Alam Semesta. Demikian juga kepada Ayah dan Ibu, sujud ta'dhim penulis kepada beliau berdua. Maaf, putera-mu ini terlalu sering membuat ayah dan ibu menangis.

Kepada Drs. Priyatmoko, MA dan seluruh pengajar di Program Studi Ilmu Politik FISIP Unair, terima kasih atas transformasi pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di FISIP Unair. Juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis.

Tentunya tidak cukup ruang, apabila penulis menyebutkan keseluruhan pihak yang telah membantu penulis. Sehingga hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis persembahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan semoga karya yang jauh dari baik ini bermanfaat bagi banyak orang.

Wassalam

Sidoarjo, 1 Agustus 2006

ABSTRAKSI

Hubungan antara Islam dan negara sudah menjadi permasalahan nasional bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Hal itu sudah menjadi wacana lama dalam panggung politik bangsa Indonesia. Setelah melalui berbagai perdebatan, secara pelan-pelan wacana tersebut mulai terlupakan dan kemudian menjadi sesuatu yang haram dibicarakan seiring dengan berkuasanya rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru, dengan Soeharto sebagai pucuk pimpinannya, tidak menginginkan ada asas lain di negeri ini selain Pancasila. Oleh karena itu, Soeharto 'memaksakan' Pancasila sebagai asas tunggal bagi segala bentuk organisasi. Semenjak itu mendiskusikan atau membicarakan hubungan Islam dan negara menjadi sesuatu yang diharamkan. Kondisi seperti ini berlangsung selama tiga dekade kekuasaan Soeharto. Setelah didahului oleh berbagai gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat di seluruh Indonesia, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998.

Bergulirnya reformasi di Indonesia telah memberi angin segar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia setelah lebih dari tiga dekade berada di bawah hegemoni Orde Baru. Saluran-saluran berekspresi melalui partai politik yang sebelumnya tertutup rapat telah terbuka. Diskusi atau forum-forum yang di dalamnya membicarakan asas negara dan organisasi sudah tidak lagi dilarang. Momentum reformasi memberi peluang kepada bangsa Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Masa depan yang sering disebut dengan Indonesia Baru. Bukan lagi Indonesia Lama yang dipenuhi dengan intrik dan kecurangan politik, tindakan represif kepada pengkritik pemerintah, dan pelarang pembentukan partai politik. Indonesia Baru juga menjamin kebebasan warga negara untuk mendirikan partai politik. adanya nilai-nilai demokrasi yang menjamin hal tersebut, ternyata dimanfaatkan dengan baik oleh politisi-politisi muslim untuk mendirikan partai politik Islam, salah satunya adalah Partai Keadilan (Sejahtera). Dengan kehidupan partai yang dinamis, Partai Keadilan (Sejahtera) mampu memberi warna tersendiri bagi panggung politik nasional dengan eksistensinya sampai dengan saat ini, meski harus berganti nama dengan Partai Keadilan Sejahtera.

Key Word: Reformasi, Partai Politik, Partai Politik Islam, Partai Keadilan (Sejahtera), Partai Keadilan Sejahtera.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstraksi	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SKEMA	viii
BAB I PENDAHULUAN	
I. 1. Latar Belakang Masalah	1
I. 2. Permasalahan	6
I. 3. Tujuan Penulisan	7
I. 4. Manfaat Penulisan	7
I. 5. Kerangka Teori	7
I. 6. Konseptualisasi	11
I. 6. 1. Partai Politik Islam	11
I. 6. 2. Pemikiran Politik Islam	13
I. 6. 3. Islam Politik	14
I. 6. 4. Sistem Kepartaian	16

1. 7. Operasionalisasi Konsep	
1. 7. 1. Partai Politik Islam	19
1. 7. 2. Islam Politik	19
1. 7. 3. Pemikiran Politik Islam	20
1. 8. Metodologi Penelitian	20
1. 8. 1. Unit Analisis	20
1. 8. 2. Lokasi dan Obyek Penelitian	21
1. 8. 3. Tipe Penelitian	21
1. 8. 4. Teknik Pengumpulan Data	21
1. 8. 5. Teknik Pengambilan Sampel	22
1. 8. 6. Teknik Analisis Data	22
BAB II ISLAM POLITIK PASCA ORDE BARU	
II. 1. Islam Politik Masa Orde Baru	24
II. 2. Islam Politik Pasca Orde Baru	41
BAB III METAMORFOSIS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
III. 1. Profil Partai Keadilan (Sejahtera)	48
III. 1. 1. Asas dan Tujuan	56
III. 1. 2. Nama dan Lambang	60
III. 1. 2. 1. Nama	60
III. 1. 2. 2. Lambang	61
III. 1. 3. Basis Sosial	62

III. 2. Profil Partai Keadilan Sejahtera	63
III. 3. Embrio Partai Keadilan Sejahtera di Sidoarjo	70
III. 3. 1. Bermula dari Masjid Al-Ikhlas SMA 1 Sidoarjo	70
III. 3. 2. Program dan Aktivitas Masjid Al-Ikhlas SMA 1 Sidoarjo	72
III. 3. 3. Usrah Sebagai Sistem Kaderisasi	74
BAB IV KIPRAH POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
IV. 1. Partai Keadilan (Sejahtera) pada Pemilihan Umum 1999	82
IV. 2. Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum 2004	94
IV. 3. Positioning Partai Keadilan Sejahtera Pasca Pemilu 2004	98
BAB V KESIMPULAN	101
DAFTAR PUSTAKA	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sistem Kepartaian Menurut Sartori	16
Tabel 2 Sistem Kepartaian Menurut Macridis	17
Tabel 3 Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu 1971	29
Tabel 4 Perbandingan Perolehan Suara Peserta Pemilu 1977, 1982, dan 1987	36
Tabel 5 Beberapa Kasus Antara Islam dan Negara Pada Masa Akomodatif	38
Tabel 6 Lambang Partai Keadilan	61
Tabel 7 Hasil Perolehan Suara Pemilu 1999	63
Tabel 8 Perolehan Suara Partai-Partai Islam Pada Pemilu 1999 dan 2004	81
Tabel 9 Komposisi Ideologis Partai Politik Peserta Pemilu 1999	83
Tabel 10 Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif 1999 dan 2004 di Kabupaten Sidoarjo	90



DAFTAR SKEMA

Skema 1 Corak Hubungan Islam dan Negara 37



BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Mendiskusikan permasalahan Islam dan negara tidak akan ada habisnya dan selalu menarik untuk membahasnya. Merumuskan model hubungan antara Islam dan negara sudah menjadi perdebatan sejak awal terbentuknya bangsa ini. Hal ini merupakan wacana lama dalam panggung politik nasional Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan selalu ada perdebatan dalam merumuskan model hubungan antara Islam dan negara. *Pertama*, sebagian kelompok berpendapat bahwa Islam tidak membahas masalah kenegaraan. Karenanya, tidak relevan ketika kita mendesakkan terbentuknya sebuah negara Islam. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Islam memiliki instrumen kenegaraan dan oleh sebab itu tidak ada alasan untuk memisahkan keduanya. Perdebatan tersebut kembali menghangat ketika bergulirnya reformasi politik. Gerakan politik Islam yang selama ini dibungkam oleh Orde Baru telah menemukan momentum untuk bangkit.

Bergulirnya reformasi politik yang ditandai dengan lengsemnya Presiden Soeharto (Orde Baru) dari monopoli kekuasaan pada 21 Mei 1998 telah membuka saluran kebebasan yang sudah lama tersumbat. Rakyat bebas mengekspresikan hak politik mereka. Kebebasan politik ini juga dirasakan oleh umat Islam. Seperti menemukan momentumnya, umat Islam kemudian mengekspresikan kehendak politiknya dengan bebas memilih partai politik, mendirikan partai politik,

menentukan asas di luar Pancasila, melakukan berbagai aktivitas dakwah dan terjun langsung dalam panggung politik nasional.

Kisaran reformasi di Indonesia merupakan wacana politik aktual bangsa Indonesia. Reformasi telah memberi semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk lepas dari bayang-bayang hegemoni Orde Baru. Ruang-ruang berekspresi melalui partai-partai politik yang sebelumnya tertutup rapat telah terbuka lebar. Diskusi dan pembicaraan mengenai partai-partai politik baru, yang selama Orde Baru berkuasa haram dilakukan, telah menemukan kebebasannya. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh para politisi muslim untuk mendirikan partai-partai yang diyakini dapat membawa aspirasi umat Islam, baik yang berbas Islam maupun yang tidak berbas Islam, tetapi menyuarakan aspirasi umat Islam. Kehadiran partai politik Islam ini dapat dimaklumi karena liberalisasi politik¹ yang sedang melanda Indonesia. Dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, tercatat paling tidak ada 141 partai politik didirikan. Dari angka tersebut, jumlah partai Islam mencapai 42 partai. Jelas sekali bahwa jumlah ini sangat banyak, terlebih jika dibandingkan dengan partai-partai agama non-Islam. Kristen, misalnya, hanya ada lima buah partai; yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Katolik Demokrat (PKD), Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA), Partai Demokrat Katolik (PDK), Partai Reformasi Cinta Kristus Kebangsaan Indonesia (Parcinkris). Dua partai yang disebut terakhir gagal menjadi peserta pemilu 1999. Dari Budha hanya muncul satu partai saja yaitu

¹ Liberalisasi politik yang ditandai dengan berdirinya banyak partai politik ini, digambarkan oleh Nurcholis Madjid seperti "anak-anak yang memperoleh mainan baru. Kebebasan seperti itu pernah hilang dari kita selama 30 tahun. Tiba-tiba kebebasan itu ada di tangan kita kembali sehingga dengan sendirinya menimbulkan kegembiraan. Dilihat dari sisi ini, ramai-ramai bikin partai itu wajar sekali. Seperti anak-anak yang memperoleh mainan baru." Lihat *Republika*, 7 Juni 2004.

Partai Budhis Demokrat Indonesia, tetapi partai ini tidak lolos menjadi peserta pemilu 1999. Sedangkan dari Hindu tidak ada satu partai pun yang didirikan. Dari 42 partai Islam yang didirikan menjelang pemilu 1999, yang lolos menjadi peserta pemilu ada 20 partai.²

Dari sekian banyak partai Islam, Partai Keadilan (Sejahtera)³, sekarang Partai Keadilan Sejahtera, adalah partai yang menarik untuk dicermati. *Pertama*, Partai Keadilan (Sejahtera) adalah satu-satunya partai yang pimpinan tertingginya menggunakan sebutan presiden. Menurut pengakuan Nur Mahmudi Ismail,⁴ Partai Keadilan (Sejahtera) sengaja memakai istilah presiden untuk pemimpinnya supaya istilah presiden tidak lagi sakral, sehingga tidak hanya seorang saja yang bisa menjadi presiden.⁵ Lebih daripada itu, dalam tubuh internal partai sendiri, pola kepemimpinan Partai Keadilan (Sejahtera) juga berbeda dengan partai-partai lain. Kepemimpinan dalam tubuh Partai Keadilan (Sejahtera) ditopang oleh model kolektif. Artinya, Partai Keadilan (Sejahtera) tidak tergantung hanya pada satu orang tokoh. Sebagai perbandingan, dalam PDI-P ada Megawati Sukarno Putri, PKB dengan sosok Abdurrahman Wahid, PAN dengan Amien Rais. Partai Demokrat dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan Partai Golkar

² Informasi yang paling lengkap mengenai profil partai-partai yang didirikan menjelang pemilu 1999 dapat dilihat dalam Julia I Suryakusuma. *Almanak Parpol Indonesia (API)*. Jakarta: API, 1999.

³ Partai Keadilan tidak lolos jerat *electoral threshold* 2 % pada pemilu 1999. Agar dapat menjadi peserta pemilu 2004, maka Partai Keadilan melebur dalam Partai Keadilan Sejahtera. Penulisan kata "Sejahtera" dalam tanda "kurung" menunjukkan bahwa Partai Keadilan kemudian akan melebur dalam Partai Keadilan Sejahtera. Jadi, Partai Keadilan dalam skripsi ini ditulis dengan "Partai Keadilan (Sejahtera)".

⁴ Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc adalah seorang dewan pendiri Partai Keadilan (Sejahtera) yang kemudian mendapat amanah sebagai Presiden pertama Partai Keadilan (Sejahtera). Beliau juga dikenal luas sebagai akademisi, penceramah, dan peneliti di bidang teknologi pangan.

⁵ Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (penyuting), *Mengapa Partai Islam Kalah?*. Jakarta: ALVABET, 1999, hal. 135.

dan PPP masih diuntungkan dengan keberadaan pemilih alternatif, yaitu pendukung tradisional yang tidak menghiraukan kinerja partai.

Kedua, selain mengupayakan desakralisasi terhadap istilah presiden, Partai Keadilan (Sejahtera) juga mencatat prestasi yang luar biasa dalam memperluas pengaruh di seluruh tanah air. Hanya lima bulan setelah dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, Partai Keadilan (Sejahtera) telah memiliki perwakilan di 25 propinsi dengan mendirikan Dewan Perwakilan Wilayah, 200 Dewan Pimpinan Daerah dan 1000 lebih pengurus ranting. Sampai dengan Januari 1999, hanya Propinsi Kalimantan Tengah dan Timor timur saja yang belum memiliki susunan pengurus Partai Keadilan (Sejahtera).⁶ Lebih fenomenal lagi, semua ini dilakukan dengan motor penggerak kader-kader muda yang menempuh pendidikan formal atau non-formal di dalam atau luar negeri.

Ketiga, Partai Keadilan (Sejahtera) adalah partai yang menjadikan dakwah Islam sebagai instrumen utama untuk mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat Islam tetapi tidak serta-merta ingin mendirikan negara Islam. Partai Keadilan (Sejahtera) lebih gencar melakukan usaha-usaha masuknya nilai-nilai dakwah Islam dalam berbagai undang-undang. Hal ini dapat diketahui dalam sikap politik Partai Keadilan (Sejahtera) yang tidak terlalu *ngotot* dalam isu piagam Jakarta jika dibandingkan dengan partai politik Islam lainnya.⁷ Inilah yang membedakan Partai Keadilan (Sejahtera) dengan partai politik Islam lainnya. Meski sebagai

⁶ Zainal Abidin Amir, *Peta Politik Islam Pasca-Soeharto*. Jakarta:LP3ES, 2003, hal 83-84.

⁷ Berbeda dengan PPP dan PBB yang gencar mengusulkan pencantuman kembali Piagam Jakarta ke dalam amandemen UUD 1945, tepatnya pasal 29 ayat (1). Usulan tersebut mereka sampaikan melalui fraksi mereka di MPR dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang bertugas menyiapkan amandemen pasal-pasal UUD 1945 untuk Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000

partai Islam, Partai Keadilan (Sejahtera) tidak terpaku pada program-program eksklusif, terutama isu perjuangan formalisasi syariat Islam, pembentukan negara Islam, dan lain sebagainya. Partai Keadilan (Sejahtera) justru melakukan perubahan besar dalam orientasi politiknya dengan mencoba melakukan interpretasi Islam kontekstual. Karenanya isu-isu yang dijual kepada publik bukan lagi formalisasi syariat Islam atau pembentukan negara Islam, melainkan isu pemberantasan korupsi (dengan jargon bersih dan jujur), anti gaya hidup mewah, peduli dengan permasalahan masyarakat (dengan banyaknya posko Partai Keadilan (Sejahtera) peduli), dan keadilan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya sekedar jargon, beberapa kader partai yang mendapat amanah untuk duduk di legislatif juga menunjukkan perilaku yang mendukung jargon tersebut. Mereka dalam beberapa kesempatan dengan tegas menolak pelbagai dana yang tidak jelas asal dan manfaatnya.

Keempat, konsistensi Partai Keadilan (Sejahtera) untuk memperjuangkan nilai-nilai di atas mulai membuahkan hasil. Semenjak gagal pada pemilu 1999, Partai Keadilan (Sejahtera) terus berjuang merebut simpati rakyat dengan kemampuan dan konsistensi anak-anak muda kader partai dalam mempraktikkan bagaimana hidup harmonis dalam alam demokrasi. Dalam mengekspresikan tuntutan mereka, misalnya, dilakukan dengan santun, cerdas, dan sepi dari anarkisme. Tidak hanya itu, Partai Keadilan (Sejahtera) juga melakukan kehidupan politiknya dengan simpati. Misalnya dengan membuka posko-posko kepedulian, pos keluarga keadilan, dan lain sebagainya. Metode ini dilakukan

jauh-jauh hari sebelum masa kampanye dan ternyata dapat menarik simpati masyarakat.

Upaya yang dilakukan Partai Keadilan (Sejahtera) selama lima tahun sejak gagal di pemilu 1999, ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Dengan berganti nama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Keadilan (Sejahtera) berhasil berada pada posisi keenam dalam pemilu 2004 dengan perolehan suara lebih dari 8 persen.⁸ Tentu saja ini merupakan torehan yang sangat bagus.

Empat hal tersebut di atas, merupakan *raison d'etre* mengapa Partai Keadilan Sejahtera menjadi fokus dalam studi ini.

I. 2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam studi ini.

1. Bagaimana metamorfosis terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apabila dibandingkan dengan pemilu 1999, suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004 mengalami lonjakan yang luar biasa. Mengapa hal ini dapat terjadi?

⁸ Saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilu legislatif pada tanggal 5 Mei 2004, Partai Keadilan Sejahtera berhasil mengoleksi 45 kursi di DPR-RI yang disumbangkan oleh 8.325.020 pemilih. Jika dibandingkan dengan dukungan yang didapat partai ini pada 1999 yang hanya mendapat 1.436.563 suara, praktis ada kenaikan sekitar 600 %. Sungguh hasil yang luar biasa.

I. 3. Tujuan Penulisan

1. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.
2. Mendeskripsikan asal mula terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Partai keadilan Sejahtera memperoleh hasil yang luar biasa pada pemilu 2004.

I. 4. Manfaat Penulisan

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberi nilai tambah tersendiri bagi perkembangan ilmu politik dan menjadi pelengkap dari penulisan-penulisan terdahulu, terutama yang memiliki fokus kajian yang sama.

I. 5. Kerangka Teori

Ketika menyambut tahun baru Islam pada 1 Muharram 1400 H yang bertepatan dengan 21 November 1979. Umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, seperti memiliki kekuatan yang luar biasa. Tahun baru Islam ini diikrarkan sebagai gerbang untuk memulai kebangkitan Islam. Ini merupakan aura dari Revolusi Iran yang mampu menumbuhkan keyakinan dan rasa percaya diri bahwa Islam akan kembali memimpin peradaban dunia. Menurut Fischer Michael dalam bukunya *Iran: From Religious Dispute to Revolution*, yang direSENSI oleh Burhan Magenda dan dikutip oleh Aay Muhamad Furkon, menuliskan bahwa Revolusi Iran adalah yang pertama di Dunia yang menjadikan Islam sebagai

semangat revolusinya.⁹ Oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang mengherankan apabila revolusi Iran memiliki pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat Islam di seluruh dunia. Aktivistis-aktivis Islam pun banyak yang terinspirasi dari revolusi Iran sehingga mereka menjadikan Islam sebagai landasan gerakan.

Untuk kasus Indonesia, era kebangkitan sosial-Islam (*Islamic-Social Movement*) banyak dipengaruhi oleh revolusi Iran. Pemberitaan media secara besar-besaran tentang revolusi Iran telah menyulut semangat aktivis-aktivis muslim untuk melakukan gerakan sosial melawan rezim otoriter Orde Baru yang pada dekade ini gerakan sosial-Islam yang didominasi oleh gerakan kelompok *tarbiyah* (terdidik) mencoba untuk melakukan *counter* terhadap pemerintah yang berkuasa pada waktu itu.

Untuk menganalisa lebih mendalam terhadap gerakan sosial-Islam *tarbiyah* sampai menjadi Partai Keadilan Sejahtera, penulis akan menggunakan pendekatan Neil J. Smelser.¹⁰ Dalam teori gerakan sosial politiknya, Smelser membagi tahapan-tahapan gerakan sosial politik sebagai berikut: *pertama, structural conduciveness*. Dalam tahapan ini, gerakan sosial politik pada dasarnya sangat bergantung dengan sistem sosio-ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari multi etnis dan dalam sistem sosialnya terjadi ketimpangan dan kesenjangan atau diskomunikasi antar etnis, maka akan muncul gerakan sosial politik yang bercorak etnis. Demikian juga apabila dalam masyarakat terjadi stratifikasi ekonomi dan stratifikasi tersebut menimbulkan

⁹ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju, 2004, hal. 108.

¹⁰ Disarikan dari bahan perkuliahan Gerakan Sosial dan Politik yang diasuh langsung oleh Drs. Aribowo MA.

disparitas yang dalam antar kelompok ekonomi, maka akan muncul pula potensi gerakan sosial politik bernuansa kesenjangan ekonomi. Akhirnya, apabila dalam suatu masyarakat ada ketidakadilan dalam kehidupan beragama, maka akan muncul pula gerakan sosial yang bercorak keagamaan.

Semua ini menunjukkan bahwa pola sistem sosio-ekonomi dan kultural masyarakat akan memberi warna pada perkembangan gerakan sosial. Apalagi jika dalam suatu masyarakat itu sistem sosio-ekonomi dan kulturalnya tidak mengarah ke *general agreement* tentang persoalan yang terjadi dan dalam masyarakat tersebut tidak ada lembaga dan norma yang bisa melakukan asimilasi dari perbedaan antar komponen dalam sistem sosial, maka masyarakat akan berkembang menuju kondisi *structural conduciveness*.

Kedua, structural Strain. Apabila dalam suatu masyarakat telah berkembang kondisi sosial yang mengarah ke disparitas, ketimpangan, tidak ada asimilasi antar etnis, tidak ada komunikasi antar kelompok, maka secara otomatis akan berkembang keadaan *structural strain*. Masyarakat yang ada dalam kondisi ini, biasanya akan aktif melakukan diskusi-diskusi yang di dalamnya membahas tentang ketimpangan sosial, disparitas ekonomi dan sosial, dan tersumbatnya saluran-saluran aspirasi politik publik.

Dalam tahapan ini, masyarakat mulai merasa gelisah dengan keadaan yang mereka alami. Masyarakat mulai banyak yang mengalami deprivasi relatif (*relative deprivation*) karena kehilangan posisi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Ketiga, spread of a generalized belief. Dalam tahapan ini, masyarakat mulai melakukan identifikasi dan mencari sumber-sumber terjadinya ketegangan structural yang ada dalam masyarakat. Karena itu, dalam masyarakat mulai berkembang diskusi-diskusi untuk membahas permasalahan yang ada sehingga masyarakat semakin berada dalam kondisi gelisah dan menuntut adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Keempat, precipitating factors. Dalam tahapan ini masyarakat semakin mengalami kegelisahan tentang apa yang telah terjadi dalam sistem kehidupan mereka. Masyarakat telah menemukan sebab-sebab dari akar persoalan sosial dan politik. Jika ada permasalahan sosial dan politik yang muncul, yang terkait dengan substansi ketegangan sosial dan politik yang ada, maka kasus tersebut dengan mudah menjadi faktor pemicu suatu gerakan sosial politik untuk muncul kepermukaan. Faktor *precipitating* inilah yang akan memunculkan suatu kegelisahan sosial-politik kepermukaan dan pada gilirannya akan menjadi sebuah gerakan sosial politik yang luas.

Kelima, mobilization of participants for action. Peran pemimpin sangat menentukan dalam tahapan ini. Masyarakat akan menjadi kekuatan penting untuk memobilisasi massa guna melakukan gerakan sosial politik untuk menuntut perbaikan struktur dan kehidupan masyarakat.

Keenam, operation of sosial kontrol. Gerakan sosial politik seringkali dianggap sebagai suatu usaha untuk memecahkan suatu problem secara kolektif. Apabila permasalahan telah terpecahkan, maka kemudian memerlukan sosial kontrol untuk menjaga kesinambungan kehidupan yang sudah kondusif.

1. 6. Konseptualisasi

1. 6. 1. Partai Politik Islam

Di dalam panggung politik hampir di seluruh negara-negara di dunia saat ini, baik demokratis maupun totaliter, keberadaan partai politik tidak dapat dielakkan lagi. Di negara-negara yang demokratis, eksistensi partai politik digunakan sebagai sarana mewujudkan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nanti akan menentukan kebijakan umum (*public policy*). Sedangkan di negara-negara totaliter, gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elit politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk terwujudnya stabilitas yang langgeng. Karenanya, partai politik merupakan alat yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹

Dalam beberapa literatur ilmu politik, terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda mengenai partai politik, seperti yang dirumuskan oleh Carl J. Friedrich, Sigmund Neuman, R. H. Soltau,¹² Joseph Lapalombara dan Myron Weiner,¹³ Raymond Garfield, George B. de Huszar, dan Thomas H. Stevenson.¹⁴ hanya saja ilmuwan-ilmuwan tersebut tidak menyertakan aspek ideologis dalam merumuskan definisi partai tersebut. Menurut Ramlan Surbakti, hal ini dikarenakan oleh adanya pengaruh pandangan di barat yang mengatakan bahwa ideologi telah mati (*the end of ideologi*). Padahal dalam realitasnya, setiap negara

¹¹ Miriam Budiarjo, *dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. XIII, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 159-160. lihat juga Soelistiyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta:Ghalia, 1987, hal. 111.

¹² Lihat Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hal. 161-162.

¹³ Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:Grasindo, 1992, hal. 116.

¹⁴ Lihat Soelistyani Ismail Gani, *Op.Cit.*, hal. 111-112.

pasti memiliki ideologi, apakah bersifat doktriner, pragmatis, atau jalan tengah keduanya.¹⁵

Terkait dengan aspek ideologi tersebut, Ramlan Surbakti memiliki pendapat dalam mendefinisikan partai politik. Ramlan mendefinisikan partai politik sebagai berikut: “kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang dianggap sah.”¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, jika kita mendengar partai politik Islam, maka dengan mudah kita langsung dapat mengansumsikan dengan partai yang berideologi Islam. Menurut Arskal Salim, ada lima kriteria yang dapat diajukan untuk mengenali sebuah partai dapat identifikasi sebagai partai Islam: nama, asas, tanda gambar, tujuan atau program, dan konstituen. Lebih lanjut, Arskal menjelaskan, berdasarkan lima kriteria di atas, tentang definisi partai politik Islam sebagai partai yang memakai label Islam (nama, asas, dan tanda gambar); atau partai yang tidak memakai label Islam tetapi hakekat perjuangannya adalah untuk kepentingan umat Islam tanpa harus mengabaikan kepentingan umat agama di

¹⁵ Lihat Ramlan Surbakti. *Op. Cit.*, hal. 116. Dalam masyarakat manapun, kehadiran sebuah ideologi merupakan sebuah keniscayaan. Karenanya keberadaan sebuah partai politik dalam sebuah negara merupakan pencerminan ideologi negara yang bersangkutan, terlepas dari keragaman definisi ideologi yang dipakai setiap partai politik

¹⁶ *Ibid.*, hal. 116.

luar Islam; atau partai yang tidak memakai label Islam dan tujuan atau programnya untuk semua warga negara Republik Indonesia, namun kebanyakan konstituennya adalah umat Islam.¹⁷

I. 6. 2. Pemikiran Politik Islam

Rahman Zainuddin mendefinisikan pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik, sejak dari masa Yunani Kuno hingga masa kini.¹⁸ Dengan demikian, adanya label Islam dalam *Pemikiran Politik Islam* menandakan adanya penyempitan ruang lingkup kajian pemikiran politik atau gagasan di bidang politik yang berlangsung di kalangan umat Islam, sejak zaman kerasulan Muhammad sampai dengan masa sekarang. Atau dengan kata lain, pemikiran politik Islam adalah salah satu bidang kajian dalam ilmu politik yang berdiri sejajar dengan bidang kajian pemikiran politik lainnya, seperti: pemikiran politik barat, pemikiran politisi di negara-negara berkembang, dan pemikiran politik Indonesia.

¹⁷ Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, Jakarta:Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999, hal. 8-11. Lihat juga Azyumardi Azra, "Islam Politik pada Masa Pasca-Soeharto", kata pengantar dalam A. M. Fatwa, *Satu Islam Multiparta*, Bandung:Mizan, 2000, hal. 13.

¹⁸ A. Rahman Zainuddin, "Pemikiran Ilmu Politik" dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia, 1990, hal. 3.

I. 6. 3. Islam Politik

Pada umumnya, istilah Islam politik seringkali ditentang dengan Islam kultural.¹⁹ Islam politik seringkali dipandang sebagai Islam yang ditampilkan sebagai dasar ideologi yang kemudian berwujud partai politik. Sehingga Islam dipandang sebagai satu-satunya dasar atau ideologi. Dengan demikian ada penekanan kuat bahwa aspek legal formal idealisme politik adalah Islam, yang pada gilirannya memunculkan ketegangan terus-menerus antara Islam dan negara. Sementara di sisi yang lain, ada aliran yang menekankan substansi Islam daripada bentuk legal formal Islam. Mereka berpendapat bahwa yang dibutuhkan bukanlah membangun negara Islam, melainkan memperjuangkan masyarakat Islam yang dicirikan oleh representasi politik kalangan Islam yang tinggi serta mengacunya berbagai kebijakan negara kepada kepentingan-kepentingan Islam. Demikian juga yang dipahami oleh Oliver Roy tentang Islam politik. Dia berpendapat bahwa Islam politik adalah aktivitas sekelompok orang yang meyakini Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai ideologi politik yang menginginkan terwujudnya masyarakat Islam.²⁰

Pada beberapa tahun terakhir ini, ada kecenderungan substansialisme Islam telah melahirkan Islam politik format baru. Dengan wataknya yang substansialis dan menekankan prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, pluralisme, dan kebebasan pendapat, maka Islam politik format baru ini dapat

¹⁹ Islam kultural adalah Islam yang lebih banyak bergerak di bidang dakwah, pendidikan, seni, tanpa terlibat dalam bidang politik. Lihat Azyumardi Azra, "Islam Politik dan Islam Kultural: Islam Pasca-Soeharto", dalam Arief Subhan (peny.), *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999, hal. 75-77.

²⁰ Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, Bandung: Serambi, tanpa tahun, hal. 1-15.

membuka hubungan yang harmonis antara Islam dengan negara, meskipun negara tersebut tidak berasaskan Islam. Islam politik format baru ini memiliki kekhususan sebagai berikut: *pertama*, landasan teologis. Islam politik format baru tidak memandang perlu keterkaitan legalitas antara Islam dan negara. Mereka akan mendukung dan loyal kepada negara selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang terpenting bagi mereka adalah terwujudnya kehidupan berbangsa yang berkeadilan, terjaminnya hak-hak warganegara untuk menyampaikan pendapat, dan adanya jalan keluar damai setiap ada permasalahan. Ini semua jauh lebih penting daripada memposisikan Islam sebagai asas.

Kedua, tujuan. Secara tegas Islam politik format baru tidak mencita-citakan terbentuknya sebuah negara Islam. Namun dalam berkiprah mereka mencoba membangun sistem sosial-politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kesetaraan, musyawarah, partisipasi, dan keadilan.

Ketiga, pendekatan Islam politik format baru ini sama dan sebangun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam politik tidak menjadikan model politik partisan dan parlemen sebagai instrument satu-satunya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. Mereka juga membentuk organisasi kemasyarakatan-keagamaan, seperti gerakan tarbiyah, muhammadiyah, dan nahdlatul ulama, untuk meraih tujuan mereka.

I. 6. 4. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik.²¹ Menurut pandangan Giovanni Sartori, sistem kepartaian dapat dibagi berdasarkan jarak ideologi. Karenanya, Sartori membagi sistem kepartaian dalam tiga bagian: pluralisme sederhana, pluralisme moderat, dan pluralisme ekstrem.²²

Tabel 1.
Sistem Kepartaian Menurut Sartori

Sistem Partai	Kutub	Polaritas	Arah
Pluralisme Sederhana	Bipolar	Tidak ada	Sentripetal
Pluralisme Moderat	Bipolar	Kecil	Sentripetal
Pluralisme Ekstrem	Multipolar	Besar	Sentrifugal

Multipolar berarti sistem partai yang berpijak pada kutub partai dengan perbedaan ideologis yang tajam di antara kutub-kutub itu. Bipolar berarti kegiatan actual suatu sistem partai yang berdiri di atas dua kutub, sekalipun jumlah partai politik lebih dari dua dan di dalamnya tidak dijumpai jarak ideologis yang saling berjauhan. Sedangkan polarisasi besar digunakan untuk melihat adanya perbedaan ideologi yang sangat tajam di antara partai-partai, seperti partai nasionalis dan partai politik Islam. Sedangkan dari sudut pandang perilaku politik, kadang partai politik ada yang bergerak menjauhi pusat dan berusaha menciptakan sistem sendiri (*sentrifugal*), di sisi yang lain, ada pula partai politik yang bergerak menuju pusat atau ke integrasi nasional (*sentripetal*). Gejala ini dinamakan

²¹ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 124.

²² *Ibid.* hal. 127-129.

depolarisasi yang selanjutnya akan mencapai suatu konsensus dasar mengenai asas dan tujuan negara yang hendak diraih.

Sistem kepartaian pluralisme ekstrem, menurut Sartori, bisaanya terdapat di negara-negara berkaembang di mana masyarakatnya secara sosio-kultural tergolong majemuk. Sistem ini melahirkan partai politik dalam jumlah yang banyak dan masing-masing memiliki landasan ideologi yang saling bertentangan sehingga consensus sulit dicapai. Berdirinya suatu pemerintahan yang stabil sangat tergantung pada kemampuan mewujudkan koalisi. Apabila koalisi gagal, sistem ini akan menghendaki lahirnya suatu kekuatan politik besar yang mampu menciptakan ketertiban dan keberlangsungan dalam kehidupan sosio-kultural.

Apabila Sartori mebagi sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi, tidak demikian dengan Roy C. Macridis. Roy membagi sistem kepartaian berdasarkan pada sumber dukungan partai, organisasi internal, dan fungsi yang dilakukan dan cara-cara tindakannya.²³

Tabel 2.

Sistem Kepartaian Menurut Macridis

Partai-partai	Integratif	Kompetitif
Dukungan	Sectarian (eksklusif, regional, kelas sangat ideologis)	Komprehensif (berorientasi klien dan pragmatis)
Organisasi	Tertutup (otoriter, aksi langsung, represif)	Terbuka (serba memperbolehkan dan representatif)
Cara-cara, kegiatan dan fungsi	Fiffused (integrasi nasional, pembangunan masyarakat, menekankan mobilisasi)	Terspesialisasi (agregatif dan representatif)
	Satu partai	Dua atau multi partai

²³ Ichlasul Amal (peny.), *Teori-teori Politik Mutakhir Partai Politik*, cet. II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996, 30-33.

Kriteria partai tertutup dan terbuka merupakan dua tipe yang diajukan untuk melihat organisasi internal. Partai terbuka memperbolehkan setiap orang menjadi anggota partai tanpa persyaratan yang ketat atau bahkan tidak ada persyaratan sama sekali sekaligus ada penghargaan terhadap pluralisme politik. Sedangkan dalam partai tertutup, proses rekrutmen dilakukan dengan prosedur yang ketat dan cenderung otoriter.

Sebuah partai politik, apabila kita melihatnya dari sumber dukungannya, dikatakan komprehensif apabila partai tersebut berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin dari setiap warga negara. Sebaliknya, apabila suatu partai menggunakan kelas, daerah atau ideologi sebagai daya tariknya, maka partai tersebut dinamakan sektarian.

Sedangkan jika kita melihatnya dari segi cara-cara kegiatan dan fungsi, partai dapat dibedakan menjadi dua: partai *diffused*, yaitu mengutamakan integrasi, pengawasan permanent dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi. Untuk meraih kekuasaan, dapat dilakukan melalui berbagai cara. Sedangkan partai terspesialisasi menekankan keterwakilan agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi dan kontrol pemerintah untuk tujuan terbatas dalam periode tertentu.

Apabila kita melihat sistem kepartaian dari sisi jumlah partai politik, maka kita dapat merujuk pada pembagian yang dilakukan oleh Maurice Duverger. Duverger membagi partai politik menjadi tiga bagian, yaitu sistem partai tunggal (*one party sistem*) yang menunjukkan bahwa dalam satu negara hanya ada satu

partai. Jika dalam satu negara hanya terdapat dua partai atau banyak partai tetapi yang dominan hanya dua, maka disebut sistem dwi partai (*two party system*), sedangkan sistem multipartai (*multiparty system*) merupakan gambaran ketika dalam suatu negara terdapat banyak partai dan tidak ada satu atau dua partai yang dominan.²⁴

1. 7. Operasionalisasi Konsep

1. 7. 1. Partai Politik Islam

Dalam penulisan ini, yang dimaksud partai politik Islam adalah partai yang mayoritas pendukungnya merupakan umat Islam, partai tersebut tidak harus berasaskan Islam, hakekat perjuangannya adalah untuk kepentingan umat Islam (tanpa harus mengabaikan kepentingan umat agama lainnya).

1. 7. 2. Islam Politik

Islam politik adalah umat Islam yang menampikan Islam sebagai dasar ideologi dan tertuang dalam perilaku partai politik Islam. Perjalanan Islam politik di sini dimulai dari munculnya partai politik Islam di Indonesia sampai dengan periode pasca-Soeharto yang mana kebangkitannya direpresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera

²⁴ Lihat Mirian Budiardjo, *Op. Cit.*, hal. 167-170

I. 7. 3. Pemikiran Politik Islam

Pemikiran politik Islam yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pemikiran politik atau gagasan di bidang politik yang berlangsung di kalangan umat Islam, sejak zaman kerasulan Muhammad sampai dengan masa sekarang yang dilakukan oleh politisi-politisi muslim.

I. 8. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis dalam rumusan permasalahan di atas, diperlukan sebuah metodologi penelitian. Dalam sub bab ini akan mencakup beberapa pembahasan tentang unit analisis, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

I. 8. 1. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo. Adapun yang dimaksud adalah para pemimpin partai dan aktivis partai. Unit analisis ini dipilih dengan pertimbangan, elit partai merupakan tokoh berpengaruh dalam menentukan arah politik partai. Sedangkan aktivis partai merupakan kader-kader militan yang secara konsisten akan mendukung total garis perjuangan partai. Fokus satuan analisis di atas tentunya adalah individu-individu yang merupakan *key person* (tokoh kunci) yang terkait dengan persoalan penentu arah politik partai. Dengan demikian, satuan kajian individu aktor politik diharapkan bisa menjadi mata rantai yang memiliki karakteristik yang sama

dengan kelompok aktivis partai yang bergerak sesuai dengan arah kebijakan partai.

1. 8. 2. Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi dan obyek penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo dan unsur-unsur yang ada di dalamnya.

1. 8. 3. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Whitney, penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan-hubungan antar-fenomena yang diselidiki.²⁵ Selain itu, penelitian ini tidak akan menggunakan hipotesis, karena menurut Masri Singarimbun, penelitian deskriptif boleh menggunakan atau tidak hipotesis.²⁶ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lengkap mengenai kebangkitan Islam politik pasca-Orde Baru.

1. 8. 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode riset perpustakaan (*library research*). Teknik ini berarti peneliti melakukan penelusuran dan penelaahan kepustakaan dengan

²⁵ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia, 1988, hal. 63-64.

²⁶ Masri Singarimbun (ed.). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta:LP3ES, 1987, hal. 4

tujuan untuk mendapatkan informasi atau data dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data.²⁷ Selain informasi yang didapat dari penelusuran pustaka, peneliti juga melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur, dengan tetap terfokus pada pokok permasalahan, karena penulis ingin memperoleh informasi yang lebih jauh dari narasumber tentang hal-hal yang telah dan belum diketahui penulis sebelumnya.

1. 8. 5. Teknik Pengambilan Sampel

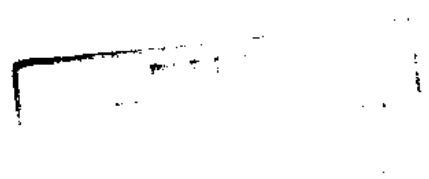
Pengambilan sampel akan dilakukan secara *purposive sampling*. Ini dilakukan karena teknik pengambilan sampel tersebut dengan mudah dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, unit sampel yang diambil disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

1. 8. 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus. Karena penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yakni bahwa sifat dari masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Maka hasil dari penelitian ini bukanlah suatu generalisasi, tetapi *pemahaman secara mendalam* terhadap suatu permasalahan. Oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif-

²⁷ *Ibid.*, hal. 70.

kualitatif, maka analisis data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi guna mendapatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti dari data yang diperoleh melalui wawancara, hasil pencarian data sekunder, dan studi pustaka.



BAB II

ISLAM POLITIK PASCA ORDE BARU

II. 1. Islam Politik Masa Orde Baru

Selama tiga dekade lebih kekuasaan Orde Baru, hubungan antara Islam politik dengan pemerintah Orde Baru mengalami pasang surut. Pemerintah Orde Baru selalu melakukan dua hal terhadap Islam politik, yaitu peminggiran Islam politik dan akomodasi Islam politik.

R. William Liddle, pemerhati masalah Indonesia asal Amerika, menjelaskan bahwa mulai akhir dekade 60-an sampai dengan pertengahan 80-an merupakan tahun-tahun terberat bagi umat Islam. Dalam kurun waktu tersebut umat Islam selalu dijadikan kambing hitam terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Pembajakan pesawat jet Garuda Internasional Airlines, peledakan bom di bank-bank milik Cina dan Candi Borobudur di Jawa Tengah, bentrokan antara kelompok-kelompok Islam di daerah dengan penguasa negara, serta protes ribuan kelas pekerja muslim di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta terhadap pengotoran sebuah masjid yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Kristen adalah beberapa peristiwa yang mana umat Islam dijadikan kambing hitamnya. Tetapi sejak pertengahan 80-an, kebijakan politik pemerintah terhadap umat Islam mulai berubah. Pemerintah orde baru mulai akomodatif terhadap umat Islam.

Pemerintah orde baru tidak lagi memandang kalangan Islam politik sebagai ancaman.²⁸

Agak berbeda dengan Liddle yang membagi hubungan umat Islam dengan pemerintah Orde Baru dalam dua fase, Abdul Aziz Thaba membagi dalam tiga fase.²⁹ *Pertama*, kurun waktu antara 1966-1981. Dalam kurun waktu tersebut, hubungan antara umat Islam dengan pemerintah orde baru bersifat antagonistik. Gagalnya pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) dan tidak berhasilnya upaya umat Islam dalam merehabilitasi partai politik Masyumi untuk berkiprah kembali dalam pentas politik nasional menandai model antagonistik ini.

Kedua, kurun waktu antara 1982-1985. Dalam kurun waktu tersebut, hubungan bersifat resiprokal kritis. Pola hubungan ini diawali dengan adanya gagasan tentang penyeragaman asas bagi partai politik dan organisasi sosial-kemasyarakatan. Gagasan ini kontan saja mendapatkan tentangan keras dari partai politik dan organisasi sosial-kemasyarakatan. Tetapi melalui serangkaian tindakan represif untuk memaksakan gagasan tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal.

Ketiga, hubungan yang bersifat akomodatif sejak tahun 1986-1994. Azis Thaba menjelaskan bahwa semenjak pertengahan 1980-an terjadi hubungan akomodatif antara umat Islam dengan pemerintah orde baru dengan ditandai disahkannya RUU Peradilan Agama, pengiriman da'i-da'i ke daerah-daerah

²⁸ Lihat R. William Liddle, *Islam, Politik dan Modernisasi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1997, hal. 67-70

²⁹ Lihat Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal 240.

transmigrasi, pembentukan ICMI, peningkatan kiprah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, dan sebagainya.

Hampir sama dengan Abdul Aziz Thaba, A. M. Fatwa juga membagi hubungan umat Islam dengan pemerintah Orde Baru dalam tiga periode.³⁰ Hanya saja kurun waktu masing-masing periode menurut Fatwa berbeda dengan Thaba. Periode *pertama* menurut Fatwa adalah periode marjinalisasi (1968-1986). Pada periode ini umat Islam, menurut Fatwa, “sungguh sengsara” akibat dari proses marjinalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Marjinalisasi terhadap kekuatan umat Islam ini terjadi karena ada ketakutan dalam diri penguasa Orde Baru akan terjadinya transformasi kekuatan Islam menjadi kekuatan politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Apabila hal ini terjadi, ditakutkan kekuatan Islam politik akan mengganggu *establishment* kekuasaan Orde Baru.

Kedua, periode *understanding* (1986-1989). Pada kurun waktu ini mulai muncul sinergi antara kekuatan Islam politik dengan pemerintah. Sinergi dapat terjadi setelah adanya manuver kalangan santri ke jajaran menengah dan atas struktur pemerintahan.

Ketiga, periode akomodasionis (1989-1998), yang dalam pandangan Fatwa ditandai dengan berdirinya ICMI dan mulai diterimanya figur-figur muslim dalam proses penyusunan kebijakan politik, dan sedikit banyak, langsung atau tidak langsung mampu mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.

Sedangkan Din Syamsudin melihat bahwa masa sepuluh tahun pertama (1966-1976) adalah “masa pengkondisian” di mana terjadi depolitisasi terhadap

³⁰ A. M. Fatwa, “Tanjung Priok Berdarah: Pergulatan Antara Islam dan Kekuasaan”, dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hal. 239.

kalangan Islam. Sepuluh tahun kedua (1976-1986) terjadi apa yang disebut dengan “masa uji coba” yang mengharuskan kalangan Islam menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam berbagai gerakan politik dan sosial.³¹

Dari uraian berbagai pakar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa di awal-awal pemerintah Orde Baru berkuasa, pemerintah menunjukkan perilaku yang tidak bersahabat kepada kalangan Islam politik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru selalu menunjukkan sikap yang cenderung meminggirkan peran politik umat Islam. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan potensi politik umat Islam yang di mata pemerintah Orde Baru dapat membahayakan eksistensi kekuasaannya. Sehingga strategi yang dipilih adalah dengan depolitisasi dan deideologisasi.³²

Berkuasanya Orde Baru pasca-Soekarno sebenarnya memunculkan harapan pada kalangan Islam politik untuk kembali menegakkan panji-panji politik Islam di panggung politik nasional sejak dilarangnya Masyumi sebagai partai politik oleh Soekarno. Namun yang terjadi kemudian justru mengecewakan kalangan Islam politik. Pemerintah Orde Baru kemudian menunjukkan, untuk pertama kali, sikap memusuhi terhadap kalangan Islam politik pada bulan Januari 1966. Pada bulan tersebut, Soeharto menolak keinginan para politisi muslim Masyumi yang diwakili oleh Prawoto Mangkusasmito untuk merehabilitasi Masyumi. Dengan jelas, Soeharto mengatakan, “faktor-faktor hukum, politik dan

³¹ M. Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Logos, Jakarta, 2001, hal. 63-73.

³² Herdi SRS, “Islam Politik dalam Kacah Demokrasi”, dalam *Prisma*, 8 Agustus 1995, hal. 89.

psikologis telah mendorong ABRI berpendapat, tidak dapat menerima rehabilitasi bekas partai politik Masyumi.”³³

Penolakan ini tentu saja mengecewakan politisi-politisi muslim Masyumi yang kemudian harus memilih jalan lain yang sesuai dengan keinginan pemerintah agar keterwakilan mereka dalam politik dapat terjamin. Oleh karena itu, kemudian muncul gagasan untuk mendirikan partai politik Islam yang sama sekali baru, tetapi semangat, idealisme dan garis perjuangan Masyumi dapat mengalir di dalamnya. Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Tujuh yang bertugas melakukan negoisasi dengan pihak pemerintah mengenai kemungkinan didirikannya partai baru, yang dimaksudkan untuk menyatukan seluruh kekuatan dan organisasi Islam yang ada dan tidak tergabung dalam suatu partai.³⁴

Setelah melalui perjuangan panjang dan negoisasi dengan pemerintah, akhirnya Soeharto mengabulkan gagasan tersebut pada Mei 1967 dengan syarat izin pembentukan partai baru dapat dikeluarkan apabila nama para mantan pemimpin dan aktivis Masyumi dicoret dari daftar susunan kepemimpinan partai. Meskipun syarat tersebut cukup memberatkan, dengan terpaksa diterima sehingga pada tanggal 20 Februari 1968 berdiri sebuah partai Islam baru dengan nama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) di bawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, dua tokoh terkemuka Muhammadiyah.³⁵

³³ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986, hal. 292.

³⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 113.

³⁵ *Ibid*, hal. 113-115.

Menurut Abdul Aziz Thaba, pemerintah mengeluarkan izin berdirinya Parmusi adalah sebagai wadah politik bagi kalangan Islam modernis. Sebab, dari tiga partai politik Islam yang ada (NU, Perti, dan SI), dua yang pertama berorientasi tradisional, sedangkan yang terakhir kurang dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan politisnya adalah menjadi wadah politik resmi bagi muslim modernis. Wadah ini diperlukan supaya aspirasi politik mereka tidak disalurkan secara inkonstitusional. Alasan lainnya adalah sebagai penyeimbang komposisi kekuatan partai politik. Terutama PNI, NU, PSI dan Perti.³⁶

Kegagalan rehabilitasi Masyumi dan dilarangnya mantan anggota Masyumi untuk aktif di Parmusi mengakibatkan daya tawar politik Parmusi rendah di hadapan pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan konflik internal partai. Situasi yang demikian mengakibatkan pengaruh Parmusi semakin kecil. Dengan kondisi seperti ini Parmusi kemudian berpartisipasi dalam pemilu 1971. Seperti yang sudah banyak diperkirakan sebelumnya, Parmusi gagal bersinar dalam pemilu 1971. Bukan hanya itu, perolehan suaranya pun merosot jauh ketika dibandingkan dengan Masyumi. Pada pemilu 1971 Parmusi hanya mampu memperoleh 20 kursi.³⁷ (lihat tabel)

Tabel 3

Jumlah perolehan suara dan kursi partai politik hasil pemilu 1971

Partai Politik	Jumlah Suara	Kursi di DPR	Persentase
Golkar	34.348.613	236	62,82

³⁶ Abdul Aziz Thaba, *Op. Cit.*, hal. 247.

³⁷ Masyumi pada Pemilu 1955 mampu meraup 57 kursi.

NU	10.213.650	58	18,68
Parmusi	3.930.746	24	7,36
PNI	3.793.266	20	6,93
PSII	1.308.237	10	2,39
Parkindo	733.359	7	1,34
Katholik	603.740	3	1,10
Perti	381.309	2	0,69
IPKI	338.403	-	0,61
Murba	48.126	-	0,08

Sumber: Biro Humas KPU. Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta. Jakarta:KPU. 2000, hal. 52 seperti dikutip oleh Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Eureka bekerja sama dengan Pudeham. 2006, hal. 76.

Kemenangan mutlak Golkar pada pemilu 1971 merupakan pangkal tolak bagi negara untuk kemudian mewujudkan pengelompokkan partai, sebuah *setting* baru panggung politik nasional yang pernah diajukan Soeharto tiga tahun sebelumnya. Selain memilih kembali Soeharto sebagai Presiden, MPR hasil pemilu 1971 juga mengambil sebuah keputusan bahwa pada pemilu berikutnya dan seterusnya hanya akan diikuti oleh tiga partai politik. Dalam penggabungan (fusi) partai ini ada empat partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti, yang dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973.

Fusi partai tersebut merupakan upaya pemerintah Orde Baru untuk semakin membatasi ruang gerak dan menekan potensi politik umat Islam. Upaya ini ditempuh oleh pemerintah Orde Baru setelah memenangkan secara mutlak pemilu 1971. Pemerintah Orde Baru kemudian berpendapat bahwa dengan banyak partai yang beragam ideologi dan tidak adanya partai mayoritas akan mengakibatkan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh

adalah mengurangi jumlah partai. Inilah kebijakan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan partai hegemonik.

Menurut Riswandha Imawan, kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 telah memberikan legitimasi konstitusional terhadap pemerintahan militer di Indonesia. Dengan dukungan penuh militer dan birokrasi terhadap Golkar dapat dipastikan akan melahirkan sistem kepartaian hegemonik.

Dengan berpedoman pada pengertian yang dikemukakan oleh Giovanni Sartori (1976), Riswandha Imawan mendeskripsikan sistem kepartaian hegemonik sebagai berikut:³⁸

Partai Hegemonik tak akan membiarkan adanya persaingan memperebutkan kekuasaan baik yang bercorak formal maupun aktual. Partai-partai lain diizinkan berdiri, tapi hanya sebagai partai kelas dua atau partai yang sekedar ada; karena mereka tidak diizinkan melakukan persaingan yang bersifat antagonistik dan atas basis yang sama dengan partai hegemonik. Perubahan tidak pernah terpikirkan. Implikasinya adalah partai hegemonik tetap menggenggam kekuasaan terlepas disukai atau tidak...

Bahkan jika partai-partai satelit itu diberi kedudukan administratif, parlemen dan pemerintahan, mereka bukanlah aktor yang memiliki hak yang luas, dan status mereka yang rendah berhadapan dengan partai hegemonik merupakan batas yang mempengaruhi secara kuat, bahkan sangat kuat, kesempatan mereka untuk berperilaku independen. Sedangkan menurut Afan Gaffar dasar sistem kepartaian hegemonik di

Indonesia terjadi karena empat faktor yang sudah direncanakan dengan baik oleh negara.³⁹ *Pertama*, menjaga dan memelihara tertib politik dan stabilitas negara dengan cara menciptakan aparat keamanan yang represif. Ini sesuai dengan karakter otoritarianisme orde baru yang sangat menekankan kepada pentingnya

³⁸ Riswandha Imawan. *Practorianisme dan Kehidupan Partai Politik di Indonesia: Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Fisipol UGM, 1994, hal. 41-42 seperti yang dikutip oleh Zainal Abidin Amir. *Op. Cit.*, hal. 51

³⁹ Afan Gaffar. *Javanese Voters*. Yogyakarta: UGM Press, 1992, hal 186 seperti yang dikutip oleh Zainal Abidin Amir. *Ibid.*, hal 51-52

lima jenis ketertiban yaitu politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan. Untuk mendukung hal tersebut, negara kemudian membentuk BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara), Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), Opsus (Operasi Khusus) dan Dirjen Sospol (Direktorat Jenderal Sosial dan Politik) di dalam Departemen Dalam Negeri.

Kedua, melakukan depolitisasi massa. Depolitisasi massa dilakukan dengan tujuan supaya negara dapat lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Pembangunan *yes*; politik, *no* adalah slogan yang terus dikampanyekan pemerintah. Dengan demikian negara dapat dengan mudah melakukan pembangunan ekonomi tanpa kontrol dari birokrasi sehingga pembangunan ekonomi justru hanya dinikmati oleh segelintir pebisnis Cina, pengusaha pribumi dan militer yang pada gilirannya menimbulkan kesenjangan ekonomi yang luar biasa.

Ketiga, proses dan undang-undang pemilu yang menjamin kemenangan Golkar. Negara lewat berbagai cabang dan rantingnya menekan setiap masyarakat dan pegawai negeri yang bekerja di pemerintahan untuk mendukung dan menyukseskan Golkar. Akhirnya, bukanlah sesuatu yang mengherankan apabila Golkar kemudian mampu meraih lebih dari 60 persen suara dalam setiap pemilu.

Keempat, adanya pengebirian partai politik. Setelah orde baru berkuasa segera dilancarkan berbagai tindakan yang jauh dari prinsip-prinsip demokrasi untuk menghabisi kekuatan dan pengaruh partai di masyarakat. Usaha ini terbukti ampuh. PNI yang merupakan partai besar berideologi nasionalis hanya kebagian 25 kursi pada pemilu 1971. Padahal PNI pernah berjaya dengan 75 kursi di

DPRGR. Penderitaan yang tidak kalah hebatnya juga dialami oleh kalangan Islam sebagaimana terlihat pada Parmusi, sebuah partai Islam yang ditenggelamkan citranya sebagai reinkarnasi Masyumi.

Dengan fusi partai tersebut, berimplikasi pada Islam politik. *Pertama*, dengan fusi partai, PPP yang merupakan partai dengan basis massa umat Islam secara otomatis menghadapi dua seteru utama yaitu Golkar dan PDI. *Kedua*, fusi partai tersebut secara tidak langsung dapat diartikan sebagai upaya memecah belah Islam politik. Sejarah pun kemudian membuktikan bahwa PPP hamper selalu diwarnai dengan konflik internal karena terjadinya tarik-menarik kepentingan antara elemen-elemen yang ada dalam PPP. Perebutan posisi-posisi kunci antara representasi NU dan Parmusi selalu menghadirkan pertentangan yang sangat tajam. Fusi partai dengan representasi golongan yang berbeda ini telah menimbulkan konflik yang tidak kunjung usai. Terkait dengan ini terdapat dua pendapat. Bagi NU yang merasa massa pendukungnya besar menuntut agar penentuan agar pembagian jumlah dan susunan pengurus berdasarkan besar kecilnya massa pendukungnya. Sedangkan unsur pendukung PPP yang memiliki jumlah massa atau pendukung kecil menuntut agar pembagian jumlah dan susunan pengurus dilakukan secara merata tanpa melihat besar kecilnya pendukung. *Ketiga*, pengelompokan ini berarti depolitisasi Islam politik karena PPP harus memenuhi 'paksaan' pemerintah dengan menerapkan asas tunggal Pancasila.⁴⁰

⁴⁰ Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi sosial-kemasyarakatan dan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tanggal 19 Februari 1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Disusul kemudian pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah berdasarkan persetujuan DPR

Sedangkan menurut Afan Gaffar,⁴¹ tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, mulai dari awal pemerintahannya sampai dengan terbentuknya PPP, terhadap kalangan Islam politik adalah sebagai gambaran nyata dari intervensi negara. Intervensi negara tersebut, masih menurut Afan Gaffar, dapat dijelaskan melalui empat argumentasi. *Pertama*, intervensi pemerintah Orde Baru merupakan bentuk nyata dari watak otoritarianisme pemerintah Orde Baru. Sebagai pemerintah yang otoriter, pemerintah Orde Baru dalam melakukan rekrutmen politik selalu merekrut individu atau kelompok yang bersedia bekerja sama dengan Negara. Hal yang lumrah dalam sebuah pemerintahan otoriter seperti Orde Baru. *Kedua*, secara statistik, umat Islam merupakan komunitas terbesar di negeri ini. Oleh karena itu, umat Islam memiliki potensi yang luar biasa. Apabila potensi tersebut dapat diorganisir dengan baik dalam sebuah partai Islam, tentu ini akan menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Maka dari itu, tentara -yang merupakan komponen utama Orde Baru- beranggapan bahwa partai Islam yang terorganisir secara baik akan mengancam eksistensinya. *Ketiga*, catatan sejarah menunjukkan bahwa partai Islam yang terorganisir dengan baik akan memiliki kecenderungan memaksakan pemberlakuan hukum Islam sebagai konstitusi nasional. Bagi tentara yang merupakan faksi nasionalis radikal berkultur abangan dan kelompok minoritas nasrani yang pada saat itu memiliki kedekatan dengan elit pemerintah, pemberlakuan hukum Islam tersebut tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, potensi politik umat Islam tidak boleh berkembang dan terorganisir

memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, mengharuskan seluruh organisasi sosial atau massa menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal.

⁴¹ Afan Gaffar, *Javanese Votes*, Yogyakarta: UGM Press, 1992, hal. 48, seperti yang dikutip oleh Zainal Abidin Amir, *Op. Cit.*, hal. 54055.

secara baik karena apabila itu yang terjadi akan membahayakan persatuan nasional. *Keempat*, intervensi yang terjadi merupakan bentuk nyata adanya konflik budaya antara perwira-perwira militer utama di sekitar Soeharto yang kebanyakan berperspektif abangan, menghadapi kelompok santri yang berperspektif arab. Pada titik ini fusi partai-partai Islam hingga terbentuk PPP merupakan wujud kemenangan kaum abangan atas kaum santri dalam panggung politik Orde Baru.

Meskipun terus mendapatkan tekanan dan intervensi dari pemerintah, PPP masih sempat memproklamirkan diri sebagai partai oposisi dengan menggunakan identitas Islam pada masa awal perkembangannya. Mereka berteriak keras terhadap arogansi pemerintah Orde Baru yang ingin merampas seluruh kemerdekaan politik melalui ratifikasi Undang-Undang Pemilu 1980 dan hasrat negara untuk mencederai keyakinan agama dengan memaksa PPP untuk menandatangani kesahan aliran kepercayaan pada tahun 1978. Namun kekuasaan negara tersebut membuat perlawanan mereka tidak berhasil. Sebaliknya, perlawanan tersebut membuat pemerintah Orde Baru merasa terganggu. Melalui peningkatan intervensi, Negara kemudian menciptakan konflik internal partai dimana faksi NU merupakan pihak yang paling dirugikan. Sebagai pihak yang merasa dirugikan, NU kemudian memutuskan menarik diri dari politik praktis di tahun 1984. Sejak saat itu warga NU tidak hanya ada di PPP, tetapi juga bermukim di Golkar dan PDI. Pada saat yang bersamaan Orde Baru menerapkan kebijakan untuk mengukuhkan posisinya dengan memaksa semua partai politik untuk melepas ideologi mereka kemudian diganti dengan satu-satunya ideologi

yang diakui negara: Pancasila. Karenanya, PPP tidak lagi diizinkan menggunakan Islam sebagai ideologi. Bahkan lambang partai ka'bah pun harus diganti dengan bintang. Semua ini menghilangkan identitas PPP sebagai partai Islam yang pada gilirannya mengakibatkan runtuhnya partai ini pada pemilu 1987 yang hanya mngumpulkan 16 persen suara, jauh di bawah perolehan suara pada pemilu 1982 yang berjumlah 27 persen. (lihat tabel).

Tabel 4

Perbandingan Perolehan Suara Peserta Pemilu 1977, 1982, dan 1987

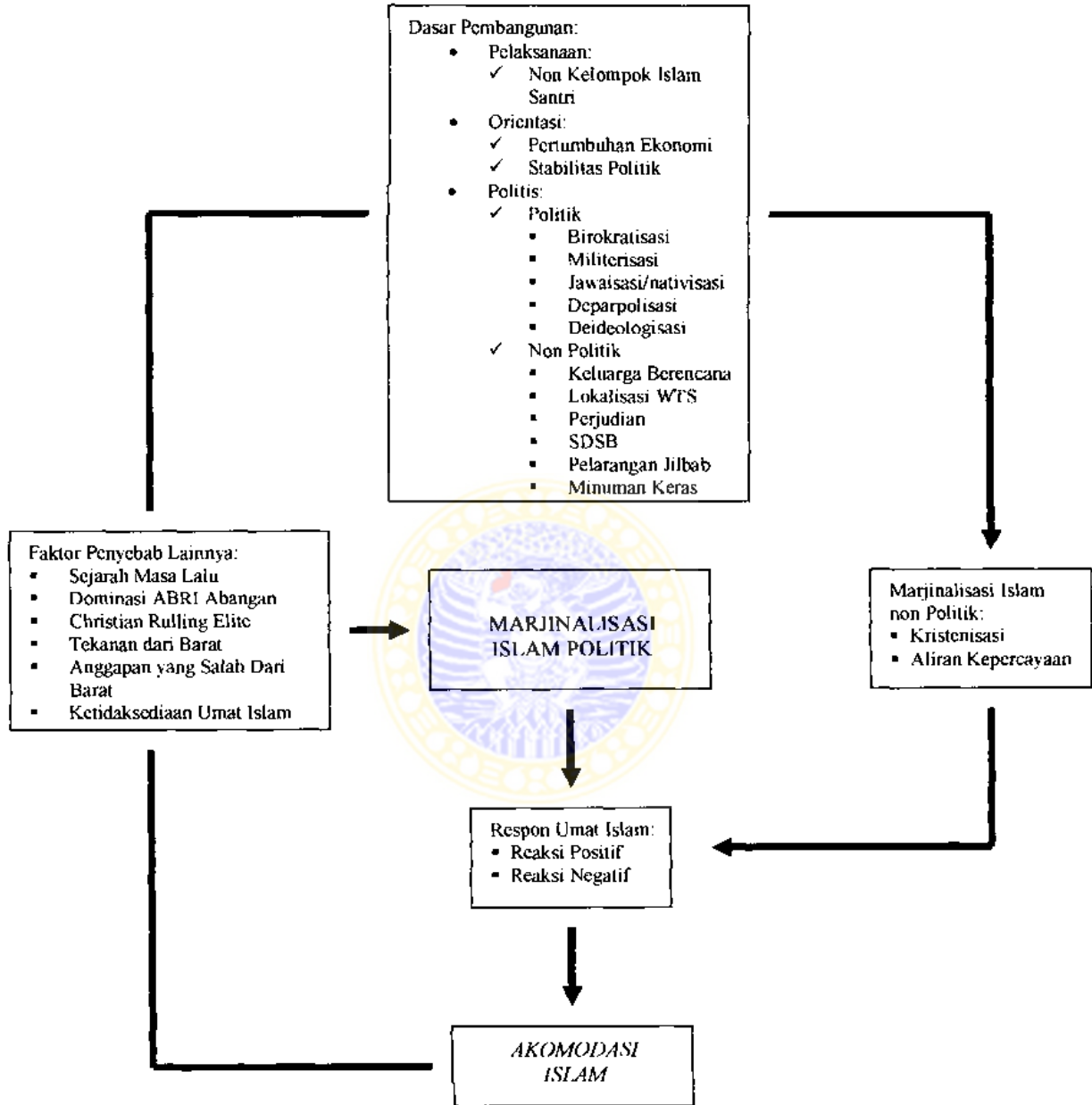
Partai Politik	Pemilu 1977		Pemilu 1982		Pemilu 1987	
	Suara	Presentase	Suara	Presentase	Suara	Presentase
Golkar	39.750.096	62,11	48.334.724	64,3	62.783.680	73,2
PDI	5.504.751	8,60	5.919.702	7,9	9.324.708	10,9
PPP	18.743.491	29,29	20.871.880	27,2	13.701.428	16

Sumber: Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Eureka bekerja sama dengan Pudeham, 2006.

Dengan semakin merosotnya pamor politik PPP, berarti pemerintah Orde Baru semakin leluasa menjadikan intervensi politik sebagai hal yang lumrah, terutama menjelang dan pada saat pemilu-pemilu Orde Baru dalam rangka menjamin kemenangan Golkar. Secara umum, corak hubungan antara Islam dan negara pada dekade 1970-an sampai dengan 1980-an dapat digambarkan sebagai berikut:⁴²

⁴² M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hal. 32.

Skema I Corak Hubungan Islam dan Negara



Catatan: *Akomodasi Islam* terjadi setelah dekade 1980-an.

Pada pertengahan 1980-an, hubungan Islam dan politik mengalami perubahan. Pemerintah Orde Baru mulai lebih akomodatif terhadap umat Islam. Bahkan memasuki era 1990-an pemerintah mulai terbuka dengan umat Islam. Dengan pembentukan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Soeharto kemudian membangun ratusan masjid. Disusul kemudian dengan, atas permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengiriman da'i ke daerah terpencil. Bahkan, tak lama berselang, pada tahun 1991, Soeharto meresmikan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dan pada tahun yang sama, Soeharto membuka festival Istiqlal.⁴³ Tidak cukup itu, pada awal 1990-an pemerintah juga memperbolehkannya para siswi di sekolah umum mengenakan jilbab. Kemudian Soeharto melakukan langkah politik yang cukup mengejutkan dengan mengizinkan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Beberapa kasus yang berkaitan dengan hubungan Islam dan negara pada masa akomodatif dapat dilihat dalam tabel berikut.⁴⁴

Tabel 5

Beberapa Kasus antara Islam dan Negara pada Masa Akomodatif

No	Kasus	Tahun	Inisiatif	Tanggapan Negara/Umat Islam
1	Tuntutan penghapusan larangan menggunakan jilbab di sekolah umum	1980-an dan 1990-an	Umat Islam	Mengakomodasi tuntutan tersebut dan tahun 1991 larangan tersebut dicabut
2	RUU Pendidikan Nasional	1998	Pemerintah	Menimbulkan reaksi pertentangan umat Islam dan dapat diselesaikan dengan <i>lobbying</i> oleh

⁴³ Dalam Festival Istiqlal ini serangkaian kekayaan budaya Islam nasional dipamerkan sebagai simbol penghargaan terhadap budaya Islam

⁴⁴ Abdul Aziz Thaba. *Op. Cit.*, hal 314-315.

				tokoh-tokoh Islam. Pemerintah mengakomodasi kepentingan umat Islam. Semua pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam dihapuskan.
3.	RUU Peradilan Agama	1998	Pemerintah	Disambut dengan antusias oleh umat Islam dan dinilai menguntungkan umat Islam. Tapi di sisi lain diprotes oleh golongan non Islam.
4.	Reaksi atas kasus Monitor	1990	Umat Islam	Pemerintah dan ABRI melarang unjuk rasa terhadap tabloid Monitor. Departemen Penerangan mencabut SIUPP Monitor dan dikenai tuduhan tindak pidana.
5.	Kasus serupa untuk Bosnia-Palestina, SDSB, Bapindo, pornografi	1990-an	Umat Islam	Pemerintah mengakomodasi
6.	Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila	1980-an s.d. 1990-an	Soeharto	Umat menyambut baik
7.	Pengiriman 1000 da'i ke daerah terpencil	1989/1990	Pemerintah dan umat Islam	Pemerintah dan umat Islam menyambut dengan baik Ormas Islam banyak yang mendukung
8.	SKB Mendagri dan Menag tentang pengumpulan zakat	1990-an	Pemerintah	Umat menyambut baik
9.	Pembentukan ICMI	Desember 1990	Pemerintah	Negara dan sebagian besar umat Islam mendukung. Sebagian lainnya bersikap hati-hati

Perubahan sikap politik Soeharto (pemerintah) pada awal dekade 1990-an

kontan saja menimbulkan tanda tanya besar bagi banyak kalangan. R. William

Liddle, misalnya, memandang rujuknya Islam dan negara di era 1990-an adalah sekedar strategi Soeharto setelah hubungan antara Presiden dan elit-elit Angkatan Darat mulai tidak harmonis.⁴⁵ Senada dengan Liddle, Eep Saefullah Fatah berpendapat bahwa keharmonisan yang terbina ini melahirkan semacam fatamorgana di kalangan Islam politik bahwa mereka menggunakan faksi-faksi dalam Orde Baru sebagai instrumen. Namun, sebetulnya, atau jangan-jangan, merekalah yang justru dijadikan instrumen politik negara yang baru.⁴⁶

Dengan demikian, dua pakar tersebut melihat bahwa hubungan yang terjalin antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru bukan hubungan murni yang berdasar “suka sama suka”, melainkan sebuah kooptasi. Oleh karena itu, pembentukan ICMI hanya sebagai sumber politik yang potensial. ICMI tidaklah berbeda dengan Golkar, dengan kata lain ICMI merupakan faksi baru dalam birokrasi negara.

Berbeda dengan Liddle dan Eep, Bahtiar Effendy berpendapat bahwa akomodatifnya Soeharto terhadap umat Islam, karena sebuah proses evolusi dari sosiologi politik umat Islam. Paling tidak ada dua hal yang menjadi alasan mengapa terjadi perubahan sikap politik pemerintah Orde Baru. *Pertama*, semenjak dekade 1980-an, kalangan Islam politik telah mengalami mobilisasi sosial-ekonomi dan politik sebagai dampak dari pembangunan ekonomi dan meluasnya akses ke pendidikan tinggi modern (di dalam atau luar negeri). Dengan

⁴⁵ R. William Liddle, *Leadership and Culture in Indonesia*. Allen and Unwin, Sydney, 1996, hal. 282 seperti yang dikutip oleh Aay Muhamad Furkon, *Op. Cit.*, hal. 122.

⁴⁶ Eep Saefullah Fatah, “Masa Depan Politik Islam: Dari Pusaran Menuju Arus Balik”, pengantar dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999, hal. 13.

kondisi seperti ini, kalangan Islam politik mampu mentransformasikan ke dalam kelompok menengah, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

Kedua, yang barangkali menjadi pertimbangan langkah-langkah akomodatif, adalah adanya transformasi pemikiran dan perilaku politik generasi baru Islam. Hal ini terjadi akibat proses transformasi intelektualisme dan aktivisme dari legalistik-formalistik menjadi lebih substansialistik.⁴⁷

II. 2. Islam Politik Pasca Orde Baru

Setelah berkuasa lebih dari tiga dekade, rezim Soeharto (Orde Baru) akhirnya jatuh dari puncak kekuasaannya. Sudah barang tentu hal ini belum pernah terpikirkan sebelumnya. Rezim yang cukup lama berkuasa akhirnya dapat dijatuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa. Fakta pun menunjukkan bahwa rezim Orde Baru jatuh pada 21 Mei 1998, baru beberapa bulan setelah dipilih lagi oleh Sidang Umum MPR 1998.

Lengser-nya Soeharto tidak dapat dilepaskan dari krisis moneter yang menerpa negara-negara Asia sejak 1997. Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Indonesia adalah negara-negara yang paling merasakan dampaknya. Kondisi seperti ini menggoncang perekonomian nasional. Pada pertengahan Agustus 1997, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai Rp. 3000 per dollar Amerika Serikat dan mencapai nilai terendah pada pertengahan Januari 1998, Rp. 15.000 per dollar.⁴⁸

⁴⁷ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press, 2001, hal. 36.

⁴⁸ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002, hal. 60.

Kondisi seperti ini telah mengakibatkan Indonesia terpuruk dalam krisis moneter yang cukup parah. Krisis ini kemudian diperparah dengan merajalclanya paraktek ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*) dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sistem pemerintahan yang otoriter dan kondisi perekonomian nasional yang terpuruk mengakibatkan gelombang besar demonstrasi dari mahasiswa dan rakyat. Awal tahun 1998 merupakan permulaan gelombang besar demonstrasi. Pada Maret 1998, dimana pada pertengahan Maret 1998 akan diselenggarakan Sidang Umum MPR RI, aksi demonstrasi yang dilakukan sudah mengarah pada isu-isu politik. Mahasiswa dalam demonstrasi menuntut dicabutnya dwifungsi ABRI dicabut dan agar undang-undang politik direvisi. Aksi mahasiswa ini sempat mereda pasca-Sidang Umum MPR, dimana Soeharto terpilih kembali untuk ketujuh kalinya sebagai Presiden. Namun sesudah itu, dengan kondisi ekonomi nasional yang semakin terpuruk dan kabinet Soeharto tidak memenuhi harapan masyarakat, aksi demonstrasi mahasiswa kembali marak dengan tuntutan pelaksanaan reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa.⁴⁹

Aksi demonstrasi mencapai puncaknya ketika terjadi penembakan terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 yang sedang berdemonstrasi di kampusnya. Kondisi ini menjadikan suhu politik nasional memanas. Puncaknya terjadi kerusuhan 14-15 Mei 1998 yang menghanguskan setiap sudut kota Jakarta.

⁴⁹ Chriss Manning dan Peter van Diermen, "Perkembangan Mutakhir dan Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis: Suatu Tinjauan Umum", dalam Chriss Manning dan Peter van Diermen, *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hal. 8.

Setelah kerusuhan tersebut, aksi demonstrasi mahasiswa semakin gencar dengan tuntutan mundur Soeharto dari kekuasaannya. Setelah beberapa hari menduduki gedung DPR/MPR RI, gerakan mahasiswa akhirnya berhasil “memaksa” Soeharto *lengser* dari kekuasaannya.

Dengan *lengser*-nya Soeharto dan Orde Baru dari kekuasaannya memberikan harapan baru bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Habibie, Wakil Presiden yang menggantikan Soeharto, telah memulau era reformasi menuju Indonesia Baru. Beberapa agenda reformasi itu dirumuskan dalam empat agenda pokok. *Pertama*, amandemen UUD 1945 yang sudah kadaluarsa karena pada awalnya UUD 1945 hanya dimaksudkan sebagai konstitusi sementara (6 bulan, setelah dibuat), tetapi sampai dengan sekarang masih diberlakukan. *Kedua*, reposisi TNI/Polri. Dengan reposisi ini berarti dwifungsi TNI/Polri perlu ditinjau ulang pelaksanaannya. TNI/Polri tidak perlu terlibat dalam politik praktis karena tempat mereka adalah di barak. *Ketiga*, menegakkan supremasi hukum yang sudah mulai tercabik-cabik akibat kesalahan Orde Baru yang menggunakannya sebagai alat kekuasaan. *Keempat*, membangun *good governance*. Salah satu cara untuk mencapai agenda ini adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁵⁰

Salah satu perubahan yang mendasar dalam kehidupan politik dan kenegaraan adalah berubahnya sistem kepartaian yang ada menjadi sistem kepartaian yang multipartai. Dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, tercatat paling tidak ada 141 partai politik didirikan untuk berpartisipasi dalam

⁵⁰ Penjelasan mengenai agenda reformasi yang komprehensif dapat dibaca tulisan Amien Rais, “Menyelamatkan Agenda Reformasi” dalam Lukman Hakim (peny.), *Reformasi dalam Stagnasi*, Jakarta: Yayasan Al-Qur’an-Mukmin. 2001.

pemilu 1999. Karena jumlah partai yang luar biasa banyak, dalam rangka persiapan pemilu 1999, pemerintah melakukan seleksi terhadap partai-partai politik baru. Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (PPPKPU) segera melakukan seleksi dengan cara memverifikasi administrative dan faktual terhadap partai-partai politik baru. Setelah melakukan verifikasi terhadap 141 partai, akhirnya PPPKPU berhasil menetapkan 48 partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu 1999 setelah terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 1999, diverifikasi dan memenuhi persyaratan sebagai calon peserta pemilu 1999.

Bergulirnya reformasi telah memberi angin segar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Reformasi telah memberi warna baru bagi kehidupan politik bangsa Indonesia setelah 32 tahun berada di bawah hegemoni Orde Baru. Saluran-saluran berekspresi melalui partai politik yang sebelumnya tertutup rapat telah terbuka. Diskusi atau forum-forum ilmiah yang di dalamnya membicarakan tentang kemungkinan membentuk partai baru, yang semasa pemerintahan Orde Baru haram dilakukan, sudah tidak lagi dilarang.

Momentum reformasi ini memberi harapan kepada masyarakat Indonesia agar bangsa Indonesia memiliki masa depan yang lebih menjanjikan. Masa depan yang lebih sering disebut dengan Indonesia Baru. Bukan Indonesia Lama yang dipenuhi dengan intrik dan kecurangan politik, tindakan represif aparat kepada pengkritik pemerintah, dan hegemoni "politik pembangunan" yang menyesatkan. Indonesia Baru yang di dalamnya menjamin berlakunya nilai-nilai demokrasi tentu tidak dapat dilepaskan begitu saja dari peranan umat Islam Indonesia. Hal ini

karena: *pertama*, berdasarkan statistik bahwa umat Islam adalah mayoritas di Indonesia. Harapan tentang Indonesia Baru juga merupakan harapan umat Islam. *Kedua*, peluang mendirikan partai baru telah terbuka. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh umat Islam untuk mendirikan partai Islam. Karena bagaimanapun juga, Islam tanpa kekuasaan politik tidak akan mampu berbuat banyak dalam memberi warna kehidupan sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik sekalipun. Oleh karena itu, kesempatan yang tersedia ini disambut baik oleh politisi-politisi muslim dengan mendirikan partai-partai yang diyakini mampu membawa aspirasi umat Islam, baik partai yang berasaskan Islam maupun yang tidak berasaskan Islam, tetapi menyuarakan aspirasi umat Islam.

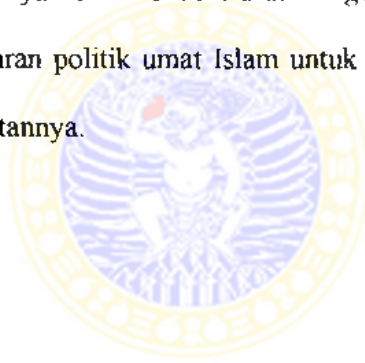
Kuntowijoyo mencatat dari 48 partai peserta pemilu 1999, ada 11 partai yang dikelompokkan sebagai partai Islam. Kesebelas partai tersebut adalah PUI (Partai Umat Islam), PKU (Partai Kebangkitan Umat), Partai Masyumi Baru, PPP, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), PSII 1905, Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi), PBB (Partai Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan), PNU (Partai Nahdlatul Ummah), dan PP (Partai Persatuan). Semua partai tersebut menganggap bahwa satu-satunya implementasi dari Islam dalam politik adalah menjadikan Islam sebagai ideologi. Karena itu, Islam dijadikan sebagai satu-satunya dasar partai.⁵¹

Berbeda dengan Kuntowijoyo, Arskal Salim berpendapat ada lima kriteria yang dapat diajukan untuk mengenali sebuah partai dapat identifikasi sebagai partai Islam: nama, asas, tanda gambar, tujuan atau program, dan konstituen.

⁵¹ Kuntowijoyo, "Peta Politik bagi Umat Islam", dalam Hamid Basyaib dan hamid Abidin (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alfabeta. 2000, hal. 89.

Lebih lanjut, Arskal menjelaskan, berdasarkan lima kriteria di atas, tentang definisi partai politik Islam sebagai partai yang memakai label Islam (nama, asas, dan tanda gambar); atau partai yang tidak memakai label Islam tetapi hakekat perjuangannya adalah untuk kepentingan umat Islam tanpa harus mengabaikan kepentingan umat agama di luar Islam; atau partai yang tidak memakai label Islam dan tujuan atau programnya untuk semua warga negara Republik Indonesia, namun kebanyakan konstituennya adalah umat Islam.⁵²

Kebangkitan Islam politik, yang ditandai dengan kemunculan partai-partai Islam, menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari kelompok Islam dalam memaknai jatuhnya rezim Orde Baru. *Lengser*-nya Orde Baru tersebut membangkitkan kesadaran politik umat Islam untuk menyongsong periode baru, yakni periode kebangkitannya.



⁵² Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*. Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999, hal. 8-11. Lihat juga Azyumardi Azra, "Islam Politik pada Masa Pasca-Soeharto", kata pengantar dalam A. M. Fatwa, *Satu Islam Multipartai*. Bandung: Mizan, 2000, hal. 13. Dengan demikian salim

BAB III

METAMORFOSIS PARTAI Keadilan Sejahtera

Umat Islam di berbagai belahan dunia seolah menemukan semangat baru untuk bangkit setelah terjadi Revolusi Islam Iran. Pada saat menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1400 H (21 November 1979 M), umat Islam merayakan dengan mengikrarkan abad XV Hijriah sebagai abad kebangkitan Islam. Sebuah kebetulan Revolusi Islam Iran terjadi pada saat umat Islam akan memasuki abad kebangkitan tersebut. Menurut Amien Rais, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia Islam, termasuk revolusi Islam Iran telah memberikan semangat bagi dunia Islam yang lain bukan dalam jangka waktu yang pendek, satu atau dua tahun, namun memiliki dampak yang cukup lama.⁵³

Di Indonesia, berita-berita Revolusi Islam Iran menjadi *headline* di Koran-koran nasional. Aktivitas-aktivitas perempuan muslim Indonesia di era 1980-an dengan bangga menunjukkan foto-foto perempuan muslim Iran yang berjilbab hitam sambil memanggul senjata. Imam Khomeini menjadi idola baru umat Islam. Poster pun ditempel di berbagai tempat. Semua ini terjadi karena ada kebanggaan dalam diri aktivis Islam terhadap Revolusi Islam Iran. Kebanggaan tersebut tidaklah berlebihan karena dalam Revolusi Iran, Islam dijadikan landasan. Dampaknya kemudian adalah bangkitnya kembali rasa percaya diri aktivis Islam untuk menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan. John L. Esposito mendiskripsikan fenomena kebangkitan Islam sebagai berikut:

⁵³ M. Amien Rais, 'Gerakan-gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya bagi Gerakan Islam Indonesia', Prisma, *Arah Baru Islam: Suara Angkatan Muda*, no. ekstra, 1984 tahun XIII, hal. 23.

“Meskipun Islam dapat diakui sebagai kekuatan yang cukup penting pada saat gerakan abad ke-20, namun kekuatan dan interaksi Islam dalam pembaharuan sosial dan politik sering tidak diperhatikan atau kurang mendapat perhatian. Bagi kebanyakan pengamat, Islam hanyalah penghalang perubahan, suatu penghalang yang relevansinya bagi tatanan politik dan sosial akan semakin berkurang. Karena itu, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di dunia Islam tidak dapat dijelaskan oleh para pengamat pada umumnya. Tiba-tiba saja para ahli (baik yang di perguruan tinggi maupun yang di pemerintahan) dan juga media massa tersentak oleh adanya suatu gejala yang diberi nama bermacam-macam, seperti “kebangkitan Islam”, “Islam militan”, atau “kebangunan Islam”. Revolusi Iran, pendudukan Masjidil Haram di Mekah, usaha untuk memperkenalkan sistem Islam (nizham al-Islam) di Pakistan, dan juga laporan dari banyak negara Islam mengenai semakin dilaksanakannya ajaran-ajaran Islam (kehadiran di masjid, busana muslim, berpuasa di bulan Ramadhan, dan lain-lain) telah memperkuat dugaan bahwa Islam telah tampil kembali dan menjadi faktor penting dalam perubahan politik dan sosial dalam bentuk yang sukar untuk dijelaskan.”⁵⁴

Terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera bukanlah melalui proses yang singkat. Dengan semangat Revolusi Iran, bangkitlah semangat generasi muda Islam untuk menjadikan Islam sebagai faktor utama dalam melakukan perubahan sosial dan politik. Melalui Gerakan *Tarbiyah*, yang diinspirasi pemikiran Hasan al-Banna, mulai memunjukkan *greget*-nya mulai awal 1980-an. Gerakan *Tarbiyah* inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Keadilan (Sejahtera), yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Bab ini akan mencoba mendiskripsikan terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera.

III. 1. Profil Partai Keadilan (Sejahtera)

Dari sekian banyak partai yang tumbuh subur menjelang pemilu 1999, Partai Keadilan (Sejahtera) merupakan partai yang sama sekali baru. dalam arti

⁵⁴ Lihat John L. Esposito (ed), “Pendahuluan” dalam *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal. 3-4.

tidak memiliki hubungan genetik maupun pertautan emosional dengan partai Islam yang pernah ada sebelumnya. Meskipun demikian, kelahiran Partai Keadilan (Sejahtera) memiliki sejarah yang cukup panjang.

Di tengah hubungan antara Islam dan negara yang tidak harmonis pada awal 1980-an, ternyata bersemi gerakan-gerakan Islam yang menjadikan masjid-masjid, terutama masjid-masjid kampus sebagai basis gerakan. Gerakan ini segera menyebar dan mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum. Diantara sekian banyak masjid, di tahun 1980-an, masjid dan kampus yang menonjol dengan kegiatan keislaman adalah Masjid Arief Rahman Hakim di kampus Universitas Indonesia (UI), Masjid Salman di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Jama'ah Salahuddin di kampus Universitas Gajah Madah (UGM), masjid al-Falah Surabaya, masjid kampus Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya.⁵⁵

Kegiatan dari Gerakan Dakwah Kampus tersebut tidak hanya dalam bentuk kelompok-kelompok diskusi, tetapi mereka juga aktif mengkaji Islam serta berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan Dakwah Kampus tersebut, yang kemudian dikenal dengan gerakan tarbiyah,⁵⁶ lebih banyak terinspirasi oleh pengaruh pemikiran al-Ikhwan al-Muslimin dari Mesir seperti Hasan al-Banna, Mustafa Masyhur, Sa'id Hawwa, dan lain-lain. Dengan

⁵⁵ Wawancara dengan Helmi Musa, 11 April 2006. Helmi Musa adalah aktivis Lembaga Dakwah Kampus ITS. Helmi juga menjelaskan bahwa Masjid Salman adalah yang paling sering menyelenggarakan training bagi kalangan mahasiswa. Pelatihan keislaman ini dikenala dengan nama Latihan Mujahid Dakwah (LMD). Helmi Musa adalah mantan sekretaris Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo. Saat ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera.

⁵⁶ Konsep *Tarbiyah* adalah *genuine* dari pemikiran Hasan al-Banna yang diaplikasikan pada jama'ah al-Ikhwan al-Muslimin. Uraian lengkap tentang persinggungan konsep *tarbiyah* dengan aktivis Partai Keadilan yang sebelumnya disebut sebagai aktivis *tarbiyah* dapat dilihat di Aay Muhamad Furkon, *Op. Cit.*, bab III

menggunakan sistem model sel yang biasa disebut dengan *usrah*,⁵⁷ kelompok ini mengalami perkembangan secara cepat. Keberadaan kelompok tarbiyah ini terdapat di hampir setiap kampus ternama di Indonesia. Keinginan untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara sempurna (*kaffah*), di tengah-tengah kejengahan hidup akibat penerapan ideologi dan tekanan rezim Soeharto, menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan mahasiswa terhadap gerakan dakwah ini.

Setelah konsolidasi internal dirasa sudah mantap, para pendukung *usrah* ini kemudian melebarkan sayap dakwahnya ke tengah-tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bertumpu pada upaya membangun ruh keislaman. Mereka kemudian tampil ke hadapan publik dengan pelbagai bentuk lembaga dan aktivitas yang meliputi antara lain lembaga penerbitan, pendidikan, dan kajian.⁵⁸

Lembaga penerbitan yang berupa majalah mulai muncul pada akhir 1986-an adalah majalah *Sabili*⁵⁹ dan *Ummi*⁶⁰. Kedua majalah ini mendapat respons yang luar biasa dari kalangan aktivis dakwah kampus yang kemudian menjadi pembaca setia *Sabili* dan *Ummi*. Selain dua majalah tersebut, mereka juga menerbitkan buku-buku terjemahan dari penulis al-Ikhwan al-Muslimin. Maka, kemudian

⁵⁷ konsep *usrah* berasal dari pemikiran Hasan al-Banna. Pada 16-18 Juni 1983 Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) menyelenggarakan sebuah seminar di Surabaya yang tujuannya untuk menyosialisasikan sistem pembinaan *usrah*. Dalam seminar tersebut akhirnya dirumuskan bahwa *usrah* itu pengertiannya adalah keluarga. Anggotanya adalah individu-individu yang menginginkan kasih sayang, saling mencintai, dan keakraban dalam lingkungan Islam. Tujuannya tidak lain untuk mencapai pribadi muslim yang mentauhidkan Allah. Dengan kata lain, *usrah* adalah keluarga kedua setelah keluarga di rumah. Apabila ada beberapa permasalahan yang tidak dapat dipecahkan di rumah, bisa diselesaikan di forum *usrah*. *Ibid.* hal. 137.

⁵⁸ Wawancara dengan Habibul Mu'iz, 13 April 2006. Habibul Mu'iz adalah Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo.

⁵⁹ Dari isi pemberitaannya, *Sabili* lebih banyak menyajikan berita-berita politik yang terjadi di luar negeri seperti berita perang di Afganistan, Bosnia, Kashmir dan lain-lain.

⁶⁰ Berbeda dengan majalah *Sabili*, *Ummi* lebih fokus pada pembinaan bagaimana menjadi seorang wanita yang *salihah*.

lahirlah al-Ishlahy Press, Gema Insani Press, Robbani Press, Pustaka al-Kautsar, as-Syamil, Era Intermedia dan seterusnya.⁶¹

Dalam dunia pendidikan mereka mendirikan Nurul Fikri dan Lembaga Pendidikan Islam al-Hikmah. Nurul Fikri adalah sebuah lembaga bimbingan belajar bagi siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Lembaga ini ternyata cukup sukses dalam membimbing para siswa untuk masuk perguruan tinggi ternama, khususnya Universitas Indonesia (UI). Para siswa ini ketika duduk sebagai mahasiswa, secara otomatis menjadi kader muda Gerakan Dakwah Kampus.⁶²

Seiring dengan perkembangan dakwah kampus, maka keberadaan lembaga kajian menjadi sebuah kemutlakan. Oleh karena itu, kemudian ada dua lembaga kajian yang didirikan oleh kalangan *tarbiyah*. *Pertama*, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah (LPPD).⁶³ *Kedua*, Lembaga Pengkajian SIDIK⁶⁴ (Studi dan Informasi Dunia Islam Kontemporer).

Gerakan Dakwah Kampus semakin mengalami perkembangan yang luar biasa dan mulai terjun dalam panggung politik dengan menguasai organisasi kemahasiswaan seperti senat mahasiswa baik di tingkat fakultas maupun universitas. Dapat dikatakan bahwa di hampir semua universitas ternama di

⁶¹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, hal. 173-175.

⁶² Aay Muhamad Furkon, *Op. Cit.*, hal. 134-135.

⁶³ Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah lebih dikenal dengan nama Khairu Ummah. Didirikan tahun 1989 dengan konsentrasi pada penyediaan tenaga pembina keislaman bagi masyarakat secara umum. Tidak hanya itu, lembaga ini juga menjadi mediator komunikasi bagi alumni aktivis dakwah kampus yang ada di luar kota. Dalam berdakwah, tidak jarang mereka harus pergi ke pelosok daerah di Indonesia. *Ibid.* hal. 135.

⁶⁴ Berbeda dengan LPPD, SIDIK lebih fokus pada bidang kajian tentang dunia Islam. Lembaga yang didirikan pada 1992 ini banyak memberitakan peristiwa politik yang dialami umat Islam di antaranya di Kashmir, Bosnia, penghancuran Masjid Babri di India, dan lain-lain. *Ibid.* hal. 135-136.

utama reformasi politik dan hukum oleh pemerintah.⁶⁹ Bahkan sehari sebelumnya KAMMI juga mengadakan rapat akbar di Arena Mahasiswa UGM dengan dihadiri sekitar 800-an massa. Kemudian diikuti dengan berbagai aksi damai menuntut reformasi. Dalam waktu yang singkat demonstrasi yang dilakukan KAMMI dalam menuntut reformasi hampir ada di setiap kota besar di Indonesia. Bahkan beberapa universitas di luar negeri juga mendeklarasikan berdirinya KAMMI seperti yang dideklarasikan KAMMI Jarwil Eropa yang ditandatangani oleh Taufik Widjaya (ketua) dan Tommy Firmansyah (Sekretaris) di Shieffield pada 22 Mei 1998.⁷⁰ Jaringan yang bermunculan dalam waktu singkat setelah Deklarasi Malang dan sebelum Muktamar I di Bekasi adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Jaringan Wilayah Sumatera (Jarwil I)
2. Jaringan Wilayah DKI Jakarta (Jarwil II)
3. Jaringan Wilayah Jawa Barat (Jarwil III)
4. Jaringan Wilayah Jawa Tengah (Jarwil IV)
5. Jaringan Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jarwil V)
6. Jaringan Wilayah Kalimantan (Jarwil VI)
7. Jaringan Wilayah Luar Negeri (Jarwil VII) yang terdiri dari Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Pakistan.

Adapun ideologi KAMMI adalah perpaduan antara disiplin ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai idealisme yang tidak tercampuri dengan kepentingan-kepentingan politik sesaat, merupakan pengaplikasian dari sebuah ideologi. Ideologi menjadi sebuah keyakinan yang berdampak pada perilaku

⁶⁹ *Ibid.* hal. 81.

⁷⁰ Aay Muhamad Furkon, *Op. Cit.*, hal. 143.

⁷¹ Andi Rahmat dan Mukhammad Najib, *Op. Cit.*, hal 81.

(*action*) yang dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan, serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaan. Sehingga ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arus dalam tindakan manusia.⁷² Segala artikulasi gerakan KAMMI harus berlandaskan ideologi Islam. Untuk menjelaskan Islam sebagai landasan ideologi KAMMI, maka terumuskanlah ideologi KAMMI sebagai berikut:⁷³

1. Kemenangan Islam adalah Jiwa Perjuangan KAMMI
2. Kebathilan adalah Musuh Abadi KAMMI
3. Solusi Islam adalah Tawaran Perjuangan KAMMI
4. Perbaikan adalah Tradisi Perjuangan KAMMI
5. Kepemimpinan Umat adalah Strategi Perjuangan KAMMI
6. Persaudaraan adalah Watak Muamalah KAMMI

Menurut Ali Said Damanik, rumusan ideologi KAMMI tersebut memiliki kemiripan dengan ideologi perjuangan al-Ikhwan al-Muslimin. Ideologi perjuangan al-Ikhwan al-Muslimin sebagaimana yang dirumuskan oleh Hasan al-Banna adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. *Allahu Ghayyatuna* (Allah Tujuan Kami)
2. *Al-Rasul Qudwatuna* (Rasul Muhammad Teladan Kami)
3. *Al-Qur'an Syir'atuna* (Al-Qur'an Undang-Undang Kami)
4. *Al-Jihadu Sabiluna* (Jihad Jalan Perjuangan Kami)

⁷² *Ibid.* hal. 188-189.

⁷³ *Ibid.* hal. 189-194.

⁷⁴ Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanil Muslimin*, jilid II, Solo: Era Intermedia, 2001, hal. 182-183

5. *Asy-Syahadah Umniyyatuna* (Mati Syahid di Jalan Allah Cita-cita Kami)

Kemiripan ini ada pada pilihan kata dan bentuk slogan yang digunakan, meski tidak terlalu mirip benar, menunjukkan persamaan ideologis.⁷⁵

Garis perjuangan politik yang dilakukan oleh KAMMI sebagai gerakan mahasiswa lebih berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*).⁷⁶ Adapun mengenai hubungan KAMMI dengan Partai Keadilan secara struktural organisasional memang tak mempunyai hubungan apapun. Namun secara kultural KAMMI memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan Partai Keadilan (Sejahtera)

III. 1. 1. Asas dan Tujuan

Jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 secara otomatis membuka jalan bagi era liberalisasi politik di negeri ini, yang ditandai dengan pendirian banyak partai politik. Kesempatan untuk mendirikan partai juga tidak disia-siakan oleh kalangan *tarbiyah*.

Berdirinya Partai Keadilan (Sejahtera) dapat dikatakan berbeda dengan partai-partai lainnya. Berdirinya Partai Keadilan (Sejahtera) berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang agenda utamanya pembahasan tentang respon terhadap era reformasi yang membuka lebar pintu kebebasan untuk berekspresi di panggung politik, salah satunya dengan mendirikan partai politik. Persoalan mendirikan partai ini tidaklah berjalan mulus. Pro-kontra mengenai

⁷⁵ Ali Said Damanik, *Op. Cit.*, hal. 193.

⁷⁶ Salah satu bukti kuat KAMMI sebagai *pressure group* adalah keberhasilan meminta eksekutif dan legislatif untuk mencabut tap MPR dalam Sidang Istimewa 1998 mengenai penetapan azas tunggal Pancasila. Padahal gerakan mahasiswa yang lain tidak menuntut hal itu.

perlu tidaknya mendirikan sebuah partai politik.⁷⁷ Ketika silang pendapat tentang perlu tidaknya mendirikan partai politik, kemudian musyawarah diperluas pesertanya dengan cara jajak pendapat berupa polling. Adapun respondennya berasal dari kalangan aktivis dakwah kampus dan alumninya (mereka yang selama jadi mahasiswa pernah aktif di gerakan dakwah kampus). Tujuan dari polling ini adalah untuk mendapatkan ide atau gagasan yang lebih objektif.⁷⁸

Polling tersebut memiliki tujuan utama untuk mengetahui seberapa besar keinginan para aktivis dakwah tentang pendirian partai politik.⁷⁹ Polling yang disebarkan sebanyak 6000 responden pada seluruh aktivis dakwah, sebanyak 5800 pertanyaan kembali. Dari jawaban yang kembali, lebih dari 86% menginginkan berdirinya partai politik, 27% menginginkan mendirikan organisasi kemasyarakatan, sedangkan sisanya menginginkan bentuk yayasan, LSM, kampus, pesantren dan lain-lain.⁸⁰

Berdasarkan polling tersebut, maka berkumpul sekitar 52 aktivis untuk mendiskusikan hasil polling tersebut. Setelah melalui perdebatan yang sengit, akhirnya forum memutuskan untuk mendirikan partai politik. Dan mereka yang berkumpul dalam musyawarah tersebut dikukuhkan sebagai dewan pendiri partai. Ke-52 orang pendiri tersebut adalah:⁸¹

1. Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA (Ketua Dewan Pendiri)
2. H. Luthfi Hasan Ishaq, MA (Sekretaris Dewan Pendiri)
3. Dr. Salim Segaf Aljufri, MA
4. Dr. Mulyanto, MEng

⁷⁷ Wawancara dengan Habibul Mu'iz, 13 April 2006.

⁷⁸ Wawancara dengan Habibul Mu'iz dan Helmi Musa, 13 April 2006.

⁷⁹ Wawancara dengan Syarif Muhtarom, 19 April 2006. Syarif Muhtarom adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera.

⁸⁰ Ali Said Damanik. *Op. Cit.*, hal. 230.

⁸¹ *Sekilas Partai Keadilan*, penerbit DPP Partai Keadilan, cetakan pertama, 1998 hal. 3-4.

5. Dr. Ir. H. Nurmahmudi Isma'il, MSc
6. Drs. Abu Ridho, A.S
7. H. Mutammimul Ula, SH
8. K.H. Abdul Hasib, Lc
9. Fahri Hamzah, SE
10. Dr. Daud Rasyid Sitorus, MA
11. Drs. H. Mukhlis Abdi
12. Dr. Agus Nurhadi
13. Igo Ilham, Ak
14. Chin Kun Min (Al-Hafidz)
15. Drs. Arifinto
16. Nursanita Nasution, SE, MS
17. H. Rahmat Abdullah
18. Dr. H. Ahmad Satori Ismail
19. Ir. H. Untung Wahono
20. Mashadi
21. H. Maddu Mallu, SE, MBA
22. H. M. Nasir Zein, MA
23. K.H. Acep Abdul Syukur
24. Dr. Ahzami Samiun Jazuli, MA
25. K.H. Yusuf Supendi, Lc
26. Hj. Yoyoh Yusroh
27. H.M. Anis Matta, Lc
28. Dra. Zirlirosa Jamil
29. Drs. H. Suharna S, MT
30. H.M. Ihsan Arlansyah Tanjung
31. Syamsul Balda, SE, MM
32. H. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi
33. Sunmanjaya Rukmandis
34. Ahmad Heriawan, Lc
35. Drs. Erlangga Masdiana, M.Si
36. Didik Ahmadi, Ak, M.Com
37. Ir. H. Suswono
38. Ahmad Zainuddin, Lc
39. K.H. Abdul Roqib, Lc
40. H. Abdullah Said Bahammus
41. H. Ahmad Hatta, MA, PhD
42. H. Makmur Hasanuddin, MA
43. Dra. Hj. Siti Zainab
44. Dra. Sri Utami
45. Nurmansyah Lubis, SE, Ak, MM
46. dr. H. Naharus Surur
47. Drs. Muhroni
48. H. Aus Hidayat
49. Ir. H. Tifatul Sembiring
50. Drs. Muzammil Yusuf

51. H.M. Tizar Zein

52. H. Fahmi Alaydrus, S. Psi.

Berdirinya Partai Keadilan (Sejahtera) dideklarasikan pada 9 Agustus 2003 dengan ditandai pembacaan Piagam Deklarasi oleh Hidayat Nur Wahid.

Piagam Deklarasi berbunyi:

“Partai Keadilan didirikan bukan atas inisiatif seseorang atau beberapa orang aktivisnya, namun merupakan perwujudan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang aspiratif dan demokratis. Sebuah survei yang melingkupi cakupan luas dari para aktivis dakwah, terutama yang tersebar di masjid-masjid kampus di Indonesia dilakukan beberapa bulan sebelumnya untuk melihat respon umum dari kondisi politik yang berkembang di Indonesia. Survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar mereka menyatakan bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk meneguhkan aktivitas dakwah dalam bentuk kepartaian dalam konteks formalitas politik yang ada sekarang. Survei ini mencerminkan tumbuhnya kesamaan sikap dikalangan sebagian besar aktivis dakwah yang dapat menjadi sebuah pola dinamis bagi pengendalian partai di kemudian hari. Terbukti setelah tekad mendirikan sebuah partai diputuskan maka kesatuan sikap secara menyeluruh menjadi kenyataan”.⁸²

Dari piagam deklarasi di atas, tampak jelas bahwa Partai Keadilan (Sejahtera) tidak didirikan oleh perorangan tetapi didirikan secara bersama-sama. Lebih daripada itu, Partai Keadilan (Sejahtera) didirikan juga merupakan respon kalangan *tarbiyah* terhadap perubahan sosial yang terjadi di awal reformasi.

Partai Keadilan (Sejahtera) secara tegas menyatakan sebagai partai yang berasaskan Islam.⁸³ Penggunaan asas Islam juga dimaksudkan untuk menjawab kesan negatif dan ekstremisme radikalisme yang seringkali dialamatkan kepada Islam. Oleh karena itu, Partai Keadilan (Sejahtera) memiliki tekad untuk membuktikan bahwa orang-orang Islam tidak pernah melakukan sesuatu yang ekstrem dan merusak, karena ajaran Islam adalah *rahmatan lil-alamin*. Tidak

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Anggaran Dasar Partai Keadilan Bab 1 Pasal 2.*

heran apabila ajaran partai ini bertujuan mewujudkan bangsa dan Negara Indonesia yang adil dan makmur yang diridloi Allah Subhanahu wata'ala.⁸⁴

III. 1. 2. Nama dan Lambang

III. 1. 2. 1. Nama

Nama dan lambang sebuah lembaga tentu memiliki makna filosofis, demikian juga dengan nama dan lambang Partai Keadilan (Sejahtera). Partai ini memilih nama keadilan bukan tanpa makna. Keadilan merupakan sebuah *sunnah kauniyah* yang menjadi ciri alamiah bagi segala sesuatu.⁸⁵ Dengan mengutip *salafus shalih*, kalangan Partai Keadilan (Sejahtera) mendefinisikan Keadilan ialah meletakkan sesuatu di tempatnya tanpa melampaui batas, sebab melampaui batas adalah dosa. Setinggi-tingginya Keadilan adalah keadilan aqidah dalam mengakui ke-Esa-an Allah, hak-Nya untuk disembah bukan ditentang, disyukuri bukan diingkari, untuk diingat bukan dilupakan.⁸⁶

Keadilan bukan hanya menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya sebagai manusia, tetapi mewedahi semua potensi inovasi dan kreativitasnya. Keadilan juga menebarkan rasa aman dan membebaskan manusia dari bentuk intimidasi dan rasa takut. Sehingga tidak ada lagi minoritas yang tertindas dan mayoritas yang dizalimi.⁸⁷ Selain itu, keadilan sebagai syarat pokok bagi semua bentuk pemerintahan yang sah. Kepatuhan terhadap pemerintah yang sah, di mana pemerintahannya hasil dari sebuah

⁸⁴ Anggaran Dasar Partai Keadilan bab II pasal 5

⁸⁵ untuk keterangan yang lebih jelas, lihat *Sekilas Partai Keadilan*, penerbit Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998, hal. 25.

⁸⁶ *Sekilas Partai Keadilan, Op. Cit.*, hal. 125.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 25-26.

pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis, merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam.

III. 1. 2. 2. Lambang

Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki tradisi kultural tersendiri, Partai Keadilan (Sejahtera) juga memiliki identitas tersendiri pula. Dengan warna putih sebagai latar, kemudian gambar ka'bah sebagai simbol pemersatu umat, dua bulan sabit yang saling bertolak belakang dan ditengahnya terdapat garis pemisah kuning yang meruncing, di atas ka'bah terdapat tulisan Partai Keadilan. Secara keseluruhan, makna lambang Partai Keadilan (Sejahtera) adalah sebagai berikut. Menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan, dan persatuan menuju kegemilangan dan kejayaan umat dan bangsa.⁸⁸ Secara ringkas, makna lambang Partai Keadilan Sejahtera dapat disajikan dalam bentuk tabel.⁸⁹

Tabel 6
Lambang Partai Keadilan

Perspektif	Gambar	Makna
Bentuk	Kotak	Kesetaraan, keteraturan, keserasian
	Ka'bah	Kesatuan umat
	Bulan Sabit	Lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan, kesinambungan sejarah
	Garis Lurus	Adil, ukhuwah, istiqamah, berani, ketegasan
Warna	Putih	Bersih, kesucian

⁸⁸ *Sekilas Partai Keadilan, Op. Cit.*, hal. 155

⁸⁹ *Aay Muhamad Furkon, Op. Cit.*, hal. 158.

	Hitam	Aspiratif, kepastian
	Kuning emas	Kecemerlangan, kegemilangan, kejayaan

III. 1. 3. Basis Sosial

Pada permulaannya, basis sosial Partai Keadilan (Sejahtera) adalah kelompok-kelompok *usrah* yang mayoritas tersebar di kampus-kampus umum dan mencurahkan kegiatan kemahasiswaannya bagi dakwah Islam di kampus. Berbagai pertemuan di kalangan aktivis dakwah kampus dari bermacam-macam perguruan tinggi telah menjadikan mereka terjalin dalam sebuah tali silaturahmi yang cukup erat.⁹⁰

Seiring dengan perjalanan waktu, telah terjadi penalaran keislaman yang selama beberapa waktu telah mereka kembangkan, pengorganisasian partai dan visi politik yang dimiliki yang diaplikasikan dari ajaran Islam yang kokoh. Pada gilirannya hal ini menjadi faktor yang dapat menjelaskan berkembangnya basis sosial Partai Keadilan (Sejahtera) dari sekedar aktivis dakwah kampus, sampai menjalar ke berbagai lapisan masyarakat lainnya, seperti pesantren, kalangan profesional, pegawai negeri, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jadi, basis sosial Partai Keadilan (Sejahtera) bukan saja berasal dari aktivis dakwah kampus, tetapi sudah merambah pada kelompok sosial lainnya.⁹¹

⁹⁰ Dengan basis sosial yang telah terkonsolidasi jauh sebelum Partai Keadilan terbentuk, maka bukanlah sesuatu yang mengherankan apabila lima bulan setelah dideklarasikan, Partai Keadilan telah memiliki perwakilan di 25 propinsi dengan mendirikan Dewan Pimpinan Wilayah, 200 Dewan Pimpinan Daerah dan lebih dari 1000 pengurus ranting. Sampai dengan Januari 1999, hanya Propinsi Kalimantan Tengah dan Timor Timur (masih gabung Indonesia) yang belum memiliki susunan pengurus Partai Keadilan. Lihat Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta:LP3ES, 2003, hal. 83-84.

⁹¹ Wawancara dengan Helmi Musa, 15 April 2006.

III. 2. Profil Partai Keadilan Sejahtera

Hasil pemilihan umum tahun 1999 telah menunjukkan bahwa hanya ada enam partai yang lolos jerat *electoral threshold* 2 % dari 48 partai peserta pemilu. Keenam partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Bangsa (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan Partai Keadilan (Sejahtera) sendiri hanya mampu meraup 1,6 % suara dan hanya berada di urutan ketujuh. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang pemilihan umum tahun 1999 Bab VII tentang syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum pasal 39, maka Partai Keadilan (Sejahtera) tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum selanjutnya, walaupun ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum maka Partai Keadilan (Sejahtera) harus bergabung dengan partai Islam lainnya atau membuat partai baru.⁹²

Tabel 7⁹³

Hasil Perolehan Suara Pemilu 1999

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Presentase	Kursi di DPR
1.	Partai Perjuangan Demokrasi Perjuanga (PDIP)	35.689.073	33,74	154
2.	Partai Golkar	23.741.749	22,44	120
3.	Partai Persatuan	11.329.905	10,71	59

⁹² Lihat Undang-Undang Pemilihan Umum 1999, bab VII pasal 39 mengenai syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum (3) Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, partai politik harus memiliki sebanyak 2 % (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum. (4) Partai politik peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh ikut dalam Pemilihan Umum berikutnya, kecuali bergabung dengan partai politik lainnya.
http://www.kpu.go.id/peraturan_uu/peraturan_uu_list.php.

⁹³ <http://www.kpu.go.id/sejarah/pemilu1999.shtml>

Pembangunan (PPP)				
4.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.336.982	12,61	51
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.528.956	7,12	35
6.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.049.708	2,00	13
7.	Partai Keadilan (PK)	1.436.565	1,6	6

Dengan kondisi demikian, maka Partai Keadilan (Sejahtera) segera menyiapkan langkah antisipasi dalam menyongsong pemilu 2004 dengan mempersiapkan partai baru.⁹⁴ Pada 2001, melalui sebuah rapat pleno akhirnya diputuskan untuk mencari cara lain untuk melakukan dakwah melalui jalur politik. Dalam rapat tersebut terdapat dua arus utama untuk melakukan dakwah melalui jalur politik. Dua arus utama tersebut adalah, *pertama*, Partai Keadilan (Sejahtera) sebaiknya berubah bentuk menjadi organisasi massa saja. *Kedua*, karena Partai Keadilan (Sejahtera) terhalang oleh undang-undang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum berikutnya, satu-satunya cara adalah menyiapkan berdirinya partai baru yang simbol, filosofi perjuangan, dan tujuannya tidak jauh dengan Partai Keadilan (Sejahtera).⁹⁵

Akhirnya, forum menyepakati pembentukan partai baru merupakan solusi yang tepat untuk melanjutkan dakwah melalui panggung politik. Tugas untuk merumuskan dan mempersiapkan terbentuknya partai baru diserahkan kepada Muzammil Yusuf, dkk. Dalam beberapa kali rapat yang diselenggarakan selalau

⁹⁴ Wawancara dengan Agus Suprianto, 17 April 2006. Agus Suprianto adalah Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo

⁹⁵ *Ibid.*

diwarnai dengan perdebatan sengit, terutama terkait dengan nama partai baru tersebut. Tambahkan kata “sejahtera” dibelakang nama Partai Keadilan (Sejahtera) menjadi alternatif terbaik karena mendapat dukungan sebagian besar peserta rapat. Adapun landasan filosofisnya adalah untuk memberikan tekanan yang lebih besar, bukan saja pada perjuangan hukum pada tingkat politik, tapi ingin menyelesaikan persoalan kesejahteraan yang ada pada masyarakat tingkat bawah.⁹⁶

Sedangkan menurut Kamaruddin, landasan filosofi berdirinya Partai Keadilan Sejahtera merupakan cermin dari cara pandang aktivisnya terhadap Islam dalam satu sisi dan terhadap langkah-langkah berjenjang peralihan cita-cita dakwah Islam di sisi lain. Pokok-pokok pikiran yang melandasi pendirian partai ini adalah kenyataan bahwa manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini, tidak mungkin mengelak dari tanggungjawabnya melaksanakan misi khalifah yang diamanahkan kepadanya yaitu memelihara, mengatur, dan memakmurkan bumi yang merupakan aktivitas politik yang paling otentik.⁹⁷

Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia pada saat ini, bukan hanya keadilan yang didambakan, tetapi saat ini kesejahteraan merupakan hal yang paling didambakan masyarakat Indonesia. Untuk menggambarkan kesejahteraan dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia, maka lambing padi adalah simbol yang paling relevan.⁹⁸

⁹⁶ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju, 2004, hal. 290.

⁹⁷ Kamaruddin, “Partai Keadilan Sejahtera: Ikon Baru Politik Indonesia” dalam jurnal *Tashwirul Afkar* No. 16 Tahun 2004, hal. 63.

⁹⁸ Aay Muhamad Furkon, *Op. Cit.*, 290.

Lebih lanjut, makna lambang Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:⁹⁹

1. Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan dan keserasian
2. Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam, yaitu ka'bah
3. Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah
4. Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqamah, berani dan ketegasan yang mewujudkan kesejahteraan.

Sedangkan makna dari tiga warna yang terdapat pada bendera Partai Keadilan Sejahtera adalah:¹⁰⁰

1. Putih berarti bersih dan kesucian
2. Hitam berarti aspiratif dan kepastian
3. Kuning emas berarti kecermerlangan, kegembiraan dan kejayaan.

Secara resmi Partai Keadilan Sejahtera didirikan pada tanggal 20 April 2002. Seperti yang sudah diungkap di atas bahwa Partai Keadilan Sejahtera merupakan langkah antisipatif setelah Partai Keadilan (Sejahtera) gagal lolos jerat *electoral threshold*. Dengan demikian, wajar apabila visi dan misi partai tidak banyak berbeda dengan partai sebelumnya. Visi umum Partai Keadilan Sejahtera adalah "*sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa*".¹⁰¹ Adapun visi khususnya adalah "*Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam*

⁹⁹ <http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=art>

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Yang Nyata dari PK Sejahtera*. Jakarta: Misykat Publication. hal. 33.

mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani".¹⁰² Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:¹⁰³

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Kekuatan transformative dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang bercita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil 'alamin*
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Sedangkan Misi dari Partai Keadilan Sejahtera adalah:¹⁰⁴

1. Menyebarkan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anashir taghyir*
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai *markaz taghyir* dan pusat solusi
3. Membangun opini yang islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan memberi rahmat
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya
5. menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

6. selalu aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan *islah* dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk mewujudkan *ukhuwah Islamiyah* dan *wihdatul-ummah*, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Dari visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera di atas, tampak jelas bahwa ada kemiripan dengan Partai Keadilan (Sejahtera). Atas dasar inilah, maka pada musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan ke-XIII yang berlangsung di Wisma Haji, Bekasi Jawa Barat pada 17 April 2003, memutuskan Partai Keadilan menggabungkan diri dengan Partai Keadilan Sejahtera.¹⁰⁵

Dengan demikian, tidaklah heran apabila saat dideklarasikan. Partai Keadilan Sejahtera memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (tingkat propinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (tingkat kota/kabupaten), dan di 2155 Dewan Pimpinan Cabang (tingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PI-PKS).¹⁰⁶

Kebersamaan antara Partai Keadilan (Sejahtera) dan Partai Keadilan Sejahtera terlihat juga dari para pendirinya. Beberapa pendiri Partai Keadilan Sejahtera adalah adalah pendiri Partai Keadilan (Sejahtera). Paling tidak di sana

¹⁰⁵ Aay Muhamad Furkon. *Op. Cit.*, hal. 292.

¹⁰⁶ <http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=deklarasi&mn=3>.

terdapat nama Muzammil Yusuf, Ahzami SamiunJazuli, M. Nasir Zen, yang merupakan pendiri Partai Keadilan (Sejahtera). Berikut nama-nama pendiri Partai Keadilan Sejahtera:¹⁰⁷

1. Abdullah
2. Achyar Eldine, SE
3. Ahmad Yani, Drs
4. Ahmadi Sukarno, Lc., M. Ag
5. Ahzami Samiun Jazuli. MA, DR
6. Ali Akhmadi, MA
7. Arlin Salim, Ir
8. Bali Pranowo, Drs
9. Budi Setiadi, SKH
10. Bukhori Yusuf, MA
11. Eddy Zanur, Ir., MSAE
12. Eman Sukirman, SE
13. Ferry Noor, S.Si
14. H. Abdul Jabbar Madjid, MA
15. H.M. Ridwan
16. H.M. Nasir Zein, MA
17. Jarjani Hefni, Lc
18. Haryo Setyoko, Drs
19. Herawati Noor, Dra
20. Herlini Amran, MA
21. Imron Zabidi, M. Phil
22. Kaliman Iman Sasmitha
23. M. Islan Qolba Lubis, MA
24. M. Martri Agoeng
25. Muttaqin
26. Mahfudz Abdurrahman
27. Martarizal, Dr
28. Mohammad Idris Abdus Somad, MA, Dr
29. Muhammad Aniq S, Lc
30. Muhammad Budi Setiawan, Drs
31. Muslim Abdullah, MA
32. Musoli, MSc, Drs
33. Musyafa Ahmad Rahim, Lc
34. Nizamuddin Hasan, Lc
35. P. Edy Kuncoro, SE.Ak
36. Ruly Tisnayuliansyah, Ir
37. Rusdi Muchtar
38. Sarah Handayani, SKM

¹⁰⁷ *Ibid.*

39. Susanti
40. Suswono, Ir
41. Syamsul Hilal, Ir
42. Umar Salim Basalamah. SIP
43. Usman Effendi, Drs
44. Wahidah R. Bulan, Dra
45. Wirianingsih, Dra
46. Yon Mahmudi, MA
47. Yusuf Dardiri, Ir
48. Zaenal Arifin
49. Zufar Bawazier, Lc
50. Zulkieflimansyah. Dr

III. 3. Embrio Partai Keadilan Sejahtera di Sidoarjo

Dari uraian sebelumnya, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yang dapat dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi kelahiran gerakan dakwah kampus ini. *Pertama*, munculnya kelompok anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dan mengimplementasikan Islam sebagai jawaban terhadap tekanan politik pemerintah orde baru terhadap umat Islam. *Kedua*, terdapat sebuah ruang publik berupa masjid atau mushalla kampus, sebuah tempat dimana idealisme kelompok muda Islam mengalami perkembangan secara cepat.

Sub bab ini akan menguraikan proses kelahiran gerakan tarbiyah sampai berubah menjadi partai di Kabupaten Sidoarjo.

III. 3. 1. Bermula dari Masjid Al-Ikhlas SMA 1 Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Bandung, Surabaya, Malang, Jogjakarta, dan Jakarta, perkembangan gerakan tarbiyah di Sidoarjo agak berbeda. Jika di daerah-daerah tersebut perkembangan gerakan tarbiyah, yang lebih sering disebut dengan Lembaga Dakwah Kampus, dilakukan

di masjid atau mushalla kampus, maka di Sidoarjo gerakan tarbiyah lebih banyak dilakukan di masjid atau mushalla Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan semua bermula dari Masjid Al-Ikhlash SMA 1 Sidoarjo. Fenomena ini disebabkan beberapa hal. antara lain:

Pertama, Sidoarjo tidak memiliki kampus-kampus yang memiliki kualitas “baik”. Sehingga banyak lulusan SMA di Sidoarjo yang melanjutkan studi di luar kota dengan tujuan Surabaya, Malang, Jogjakarta, Jakarta, Bandung, dan beberapa daerah lainnya.¹⁰⁸ Pada saat itulah mereka bersinggung dengan gerakan tarbiyah di kampus mereka dimana gerakan tarbiyah lebih dulu berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila gerakan tarbiyah di Sidoarjo mulai ada dan berkembang pada awal 1990-an.

Kedua, Sidoarjo tidak memiliki kampus yang “netral”. Ada dua universitas besar di Sidoarjo. Tetapi keduanya merupakan lembaga pendidikan dari organisasi keagamaan tertentu. Kedua Universitas tersebut adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Al-Khoziny. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentu berafiliasi kepada Muhammadiyah. Sedangkan Universitas Al-Khoziny berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Dengan demikian masjid kampus kedua universitas di atas lebih banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi ciri khas kedua organisasi tersebut.

Ketiga, SMA 1 Sidoarjo memiliki jaringan alumni yang kuat dan tersebar di beberapa perguruan tinggi favorit. Sebagai SMA terbaik di Sidoarjo, tidak heran apabila banyak lulusannya yang berhasil lolos ujian masuk perguruan tinggi

¹⁰⁸ Wawancara dengan Helmi Musa. 11 April 2006.

negeri. Selama perkuliahan, mereka juga aktif di lembaga dakwah kampus. Pada saat liburan kuliah, mereka selalu melakukan dakwah di masjid Al-Ikhlas.

Dalam perkembangan berikutnya, para aktivis dakwah kemudian memiliki inisiatif untuk menyatukan alumni SMA 1 Sidoarjo dengan membentuk HAMMASDA (Himpunan Alumni Muslim-Muslimah SMA 1 Sidoarjo) pada 1992.¹⁰⁹ Ibnu Mubarak, alumni SMA 1 Sidoarjo tahun 1986 dan ITS tahun 1992, adalah salah satu motor penggerak Hammasda. Dengan mengadopsi kurikulum Latihan Mujahid Dakwah yang pernah diikutinya, Ibnu menerapkan kurikulum dakwah bagi siswa-siswi SMA 1 Sidoarjo.¹¹⁰ Lebih lanjut Ibnu mengatakan:

“...kegiatan dakwah di SMA 1 Sidoarjo merupakan buah kuatnya ikatan alumni. Banyak alumni yang menempuh pendidikan lanjutan di berbagai perguruan tinggi negeri. Kita semua aktif di lembaga dakwah kampus. Setelah melalui beberapa pertemuan, kita kemudian berpikir, mengapa kita tidak melakukan dakwah di adik-adik kita di SMA 1. Pada saat halal bi halal di sekolah sekitar tahun 1992, ada pembahasan serius tentang pembentukan lembaga dakwah di sekolah. Ya, akhirnya terbentuklah Hammasda ini.”¹¹¹

III. 3. 2. Program dan Aktivitas Masjid Al-Ikhlas SMA 1 Sidoarjo

Selain latihan mujahid dakwah seperti disebutkan di atas, Masjid Al-Ikhlas memiliki sejumlah kegiatan yang kelak menjadi model bagi masjid atau mushalla SMA yang lain. Berbagai kegiatan itu dibagi ke dalam unit-unit, yang terdiri dari unit program peribadatan, pelayanan buku-buku (perpustakaan) dan penerbitan, dan kaderisasi dakwah siswa.

¹⁰⁹ Penulis tidak mendapatkan data pasti tentang tanggal berdirinya Hammasda.

¹¹⁰ Latihan Mujahid Dakwah pertama kali dilakukan di ITB atas gagasan Imamuddin Abdul Rahim. Metode ini kemudian diterapkan oleh lembaga dakwah kampus dari berbagai perguruan tinggi di berbagai daerah. Wawancara dengan Ibnu Mubarak, 21 April 2006

¹¹¹ Wawancara dengan Ibnu Mubarak, 21 April 2006.

Untuk unit program peribadatan, Masjid Al-Ikhlas memiliki kegiatan pembinaan baca Al-Qur'an, *training* Islam, kajian terjemah Al-Qur'an, dan kajian *tarikh* (sejarah) nabi. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut, masjid Al-Ikhlas juga memiliki perpustakaan buku-buku Islam. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penerbitan majalah dakwah Al-Furqan. Penerbitan majalah dakwah ini sebagai media dakwah kepada khalayak umum di lingkungan sekolah. Dalam perkembangannya, ternyata majalah ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Tidak hanya para aktivis masjid saja, siswa kebanyakan, guru-guru juga menjadi pelanggan setia Al-Furqan.

Selain penerbitan majalah dakwah Al-Furqan, *training* Islam juga merupakan program yang memiliki arti penting. Dengan peserta dari berbagai sekolah di Sidoarjo, *Training* Islam menjadi gerbang berkembangnya kegiatan dakwah di SMA-SMA Sidoarjo. *Training* Islam merupakan pelatihan motivasi Islami yang digagas oleh aktivis Masjid Al-Ikhlas dengan Hammasda sebagai fasilitatornya. Kegiatan ini diikuti oleh siswa dari berbagai sekolah yang memiliki perhatian pada kegiatan dakwah. Mereka inilah yang kemudian menjadi penyeru dan pengajak di sekolah mereka masing-masing.

Secara umum program pembinaan Masjid Al-Ikhlas lebih ditekankan pada aspek pemahaman Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Berbagai program pembinaan menunjukkan kecenderungan tersebut. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi muslim yang memiliki dasar iman, etika, dan moralitas Islam, yang akan mereka refleksikan dalam tindakan dan tingkah laku mereka sehari-hari.

III. 3. 3. *Usrah* Sebagai Sistem Kaderisasi

Usrah merupakan sistem kaderisasi yang dikembangkan oleh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Soal *usrah*, Hasan Al-Banna menyebutkan “Islam sangat menganjurkan agar para pemeluknya membentuk kumpulan-kumpulan keluarga dengan tujuan mengarahkan mereka untuk mencapai tingkat keteladanan, mengukuhkan persatuan, dan mengangkat konsep persaudaraan di antara mereka dari tataran kata-kata dan teori menuju kerja dan operasional yang kongret. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah engkau wahai saudaraku untuk menjadi batu bata yang baik dalam bangunan Islam itu”.¹¹²

Beberapa prinsip *usrah* yang dipahami oleh Ikhwanul Muslimin adalah:¹¹³

1. Sistem *usrah* adalah sistem Islam yang mengarahkan para anggotanya ke arah nilai-nilai teladan tertinggi.
2. Mengukuhkan ikatan persatuan antar personel, terutama apabila kita ingat bahwa rukun-rukun sistem ini adalah saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*) dan saling menanggung beban (*takaful*).
3. Mengangkat jalinan persaudaraan antar personel dari tataran teori ke tingkat operasional.
4. Ia merupakan sarana untuk memudahkan interaksi dengan para personel yang merelakan diri terjun ke medan dakwah dalam satu ikatan amal.

¹¹² Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, jilid II, Solo: Era Intermedia, 2001, hal. 286.

¹¹³ Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal 128.

5. Ia merupakan sarana untuk menghimpun dana bagi Ikhwan yang mencerminkan kekuatan ekonomi yang sedang tumbuh.
6. Keterikatan dengan sistem ini merupakan kewajiban bagi semua anggota jamaah ini.
7. Sistem ini merupakan tulang punggung jamaah, baik secara individu, sosial, maupun finansial.

Sedangkan tujuan-tujuan umum *usrah* Ikhwanul Muslimin, membidik sasaran-sasaran:¹¹⁴

1. Membentuk kepribadian Muslim seutuhnya yang sanggup merespon semua tuntutan agama dalam kehidupan; mencakup akidah (keyakinan), ibadah yang benar, akhlak yang terpuji, ilmu yang bermanfaat, pengamalan dan penerapan ajaran-ajaran agama, perhatian terhadap kesehatan fisik, pemupukan keahlian dan keterampilan.
2. Mengukuhkan ikatan antara sesama anggota jama'ah, baik secara sosial maupun keorganisasian.
3. Meningkatkan kesadaran akan derasnya arus nilai yang mendukung maupun yang memusuhi gerakan Islam.
4. Memberi kontribusi dalam memunculkan potensi kebaikan dan kebenaran yang tersembunyi pada diri seorang Muslim dan mendayagunakannya untuk berkhidmat kepada agama dan tujuan-tujuannya.
5. Menanggulangi unsur-unsur destruktif dan negatif pada diri anggota.

¹¹⁴ *Ibid.* hal. 138-144.

6. Mewujudkan hakikat kebanggaan terhadap Islam dengan membangun komitmen kepada etika dan akhlak dalam semua aktivitas kehidupannya, baik di kala senang maupun di kala susah.
7. Mewujudkan hakikat loyalitas kepada jamaah dan komitmen untuk meraih tujuan-tujuannya, dalam menggunakan perangkat-perangkatnya, membangun gerakannya, dan menaati aturan serta etikanya. Semua itu membutuhkan pengorbanan, baik waktu, tenaga, maupun harta benda.
8. Mengkaji problem dan kendala yang dihadapi anggota demi tegaknya agama Islam, dengan kajian yang cermat disertai gambaran langkah solusinya yang jelas.
9. Memperdalam pemahaman dakwah dan *harakah* (gerakan) dalam diri seorang muslim. Mengingatkan setiap Muslim untuk menjadi dai dan aktivis di jalan agama Islam sesuai dengan kapasitas dan wawasan keagamaan yang telah dianugerahkan kepadanya.
10. memperdalam keterampilan manajerial dan keorganisasian dalam medan aktivis Islam.

Sedangkan *usrah* yang dipahami oleh para aktivis gerakan dakwa adalah:¹¹⁵

1. Kekuatan kelompok. Dengan aktif menghadiri kelompok-kelompok kajian secara rutin dan melakukan pertemuan untuk diskusi akan memperkaya khazanah intelektual sehingga akan memperkuat kelompok baik secara fisik maupun intelektualitas.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibnu Mubarak, 21 April 2006 dan Helmi Musa, 13 April 2006.

2. Penggalangan solidaritas kelompok akan dengan mudah terjadi apabila kekuatan kelompok telah ada lebih dahulu. Dengan demikian masing-masing peserta menjadi bagian dari kelompok dan peserta lainnya. Mereka akan menjadi sebuah bangunan, yaitu Islam.
3. Model kajian yang selalu disertai dengan ceramah dan Tanya-jawab menyebabkan transformasi nilai-nilai agama berjalan dengan baik. Peserta akan dapat memenuhi harapan mereka tentang kemungkinan diperolehnya tambahan pengetahuan agama dan perluasan cakrawala pemikiran. Lebih daripada itu, peserta juga memiliki kebebasan pendapat untuk menyampaikan gagasan-gagasannya.
4. Pembentukan dan sosialisasi norma kelompok dapat berjalan dengan baik dalam lingkungan organisasi yang sudah sehat.

Dengan metode seperti di atas, gerakan dakwah Masjid Al-Ikhlas mengalami perkembangan yang luar biasa. Dengan solidaritas yang kuat, kemampuan intelektual yang memadai, pemahaman terhadap Islam yang mumpuni, gerakan dakwah Masjid Al-Ikhlas kemudian menjadi motor kebangkitan gerakan dakwah di sekolah-sekolah lainnya. Model dan metode gerakan dakwah Masjid Al-Ikhlas kemudian banyak diadopsi oleh gerakan dakwah sekolah lainnya. Dengan demikian gerakan tarbiyah telah menemukan persemaiannya di Sidoarjo. Uniknya, persemaian tersebut tidak melalui kampus, tetapi sekolah-sekolah. Dan semua bermula dari Masjid Al-Ikhlas SMA 1 Sidoarjo. Dalam perkembangannya lebih lanjut, para aktivis dakwah yang

terhimpun dalam Hammasda menjadi pelopor berdirinya Partai Keadilan
(Sejahtera) Kabupaten Sidoarjo.



BAB IV

KIPRAH POLITIK

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SIDOARJO

Sehari setelah dilaksanakannya pencoblosan kertas suara pemilu legislatif pada 5 April 2004, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tampil sebagai bintang. Kedua partai tersebut mampu mencuri perhatian publik dengan merobohkan dominasi beberapa partai lama di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Harian *Kompas*, misalnya, memberitakan dengan judul *headline* “PDI-P Masih Teratas: Partai Demokrat dan PKS Menyodok”.

Saat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu legislatif pada tanggal 5 Mei 2004, Partai Keadilan Sejahtera mencatat prestasi luar biasa dengan meraup lonjakan kursi DPR-RI sebanyak lebih dari enam ratus persen (lihat tabel 8).

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dari tujuh partai Islam (baik yang berbasas Islam maupun yang tidak berbasas Islam tetapi berbasis massa umat Islam dan menyuarakan aspirasi umat Islam) yang berpartisipasi dalam pemilu 2004, hanya tiga partai politik saja yang perolehan suaranya meningkat, yaitu PKS, PBB, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Satu partai lagi adalah pendatang baru, yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR). Meskipun mengalami penurunan suara, perolehan kursi DPR RI untuk PKB dan PAN justru meningkat, sedangkan PPP stabil. Kondisi sebaliknya justru terjadi

pada dua partai lainnya yang meningkat perolehan suaranya tetapi terkena jerat *electoral treshhold* 3 % yaitu PBB dan PPNUI.

Bab ini akan mendiskripsikan kiprah Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 dimana pada pemilu 2004 Partai Keadilan Sejahtera mampu menarik perhatian publik dengan meraih lonjakan suara yang luar biasa. Dengan studi pada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo, penulis akan mencoba mendiskripsikan faktor apa saja yang menyebabkan Partai Keadilan Sejahtera mampu meraih lonjakan suara tersebut.



Tabel 8
Perolehan Suara Partai-Partai Islam pada Pemilu 1999 dan 2004

No	Partai	Pemilu 1999				Pemilu 2004			
		Jumlah Suara	Prosentase Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Prosentase Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Prosentase Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Prosentase Jumlah Kursi
1.	PKB	13.336.823	12,62	51	10,2	11.989.564	10,57	52	9,45
2.	PPP	11.329.905	10,72	58	11,6	9.248.764	8,15	58	10,55
3.	PAN	7.488.956	7,12	34	6,8	7.303.324	6,44	52	9,45
4.	PBB	2.069.708	1,94	13	2,6	2.970.487	2,62	11	2,00
5.	PKS	1.436.563	1,36	7	1,4	8.325.020	7,34	45	8,18
6.	PPNU	679.178	0,64	5	1,0	895.610	0,79	-	-
7.	PBR	-	-	-	-	2.764.998	2,44	13	2,36

Keterangan : Sumber Pengumuman Penetapan Hasil Pemilu Legislatif Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004. Total jumlah suara sah 113.462.414 dari jumlah pemilih sebanyak 124.449.038. Adapun jumlah pemilih terdaftar pada pemilu 2004 ini adalah 148.000.369. Sedangkan pada pemilu 1999 total suara sah sebanyak 105.846.000.

IV. 1. Partai Keadilan (Sejahtera) pada Pemilihan Umum 1999

Sub bab ini akan mendeskripsikan peranan Partai Keadilan (Sejahtera) dalam mengawal masa transisi demokrasi menuju sistem demokratis dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum 1999, merujuk pada tesis yang diajukan oleh Huntington,¹¹⁶ proses demokratisasi harus dibangun melalui cara-cara yang juga demokratis. Cara-cara tersebut antara lain: *pertama*, terlaksananya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil. *Kedua*, adanya oposisi, dan *ketiga*, dalam penyampaian artikulasi politik tidak terjadi kekerasan.

Setelah kekuasaan Soeharto runtuh pada Mei 1998, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang politik, misalnya, reformasi yang bergulir telah merubah tatanan politik nasional. Rancangan undang-undang di bidang politik yang menurut banyak kalangan, tidak lagi otoriter telah disahkan menjadi undang-undang, seperti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang Partai Politik. Akibat dari disahkannya undang-undang tersebut banyak partai yang bermunculan. Menjelang pemilu 1999 setidaknya lebih dari seratus partai yang dideklarasikan. Melihat fenomena yang demikian, Muhammad Asfar mencatat ada enam hal yang menarik untuk dicermati.¹¹⁷ *Pertama*, kehadiran partai-partai baru mampu memporak-porandakan basis massa partai politik lama. Loyalitas atau identifikasi pemilih terhadap partai politiknya mengalami pergeseran cukup drastis. Sebab, tidak sedikit partai-partai baru yang mempunyai identitas, simbol kultural dan platform politik yang kurang lebih sama dengan partai politik lama.

¹¹⁶ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta:Grafiti, 1995, hal. 223-258.

¹¹⁷ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*. Surabaya:Pustaka Eureka dan Pusdeham, 2006, hal. 111-114.

Dengan kondisi yang demikian, warga NU misalnya, tentu tidak dapat dengan mudah diidentifikasi dengan PPP, karena banyak bermunculan partai yang mengatasnamakan partainya orang NU.

Kedua, arus reformasi politik yang terjadi tampaknya kurang menguntungkan bagi partai politik lama, khususnya Golkar, yang selama ini dipersepsi oleh banyak kalangan sebagai pihak yang paling layak untuk bertanggungjawab atas terjadinya krisis ekonomi dan politik di Indonesia waktu itu.

Ketiga, banyaknya jumlah partai peserta pemilu 1999 mendorong pertarungan partai menjadi lebih bersifat ideologis. Munculnya partai-partai lama yang dibangun atas ikatan sosiologis, agama dan aliran pemikiran tertentu menguatkan tesis di atas. Asfar kemudian membagi partai politik peserta pemilu 1999 berdasarkan komposisi ideologis sebagai berikut:

Tabel 9
Komposisi Ideologis Partai Politik Peserta Pemilu 1999

No	Format Ideologis/Massa	Jumlah	%	Keterangan
1.	"Berbau" Nasionalis (PNI)	6	12,5	PDI-Perjuangan, PNP, PDI, PNI-Massa Marhaen, PNI Supeni, PNI-Front Marhaenis (Partai-partai ini banyak berwarna PNI, meskipun saat ini banyak varian pragmatisnya. Dan juga ada yang berbau nasionalis radikal.)
2.	"Berbau" Islam/Partai Islam	19	39,58	PPP, PSII, Partai Keadilan, Partai Cinta Damai, PKB, PBB, PAN, Partai NU, PUI, PUMI, PKU, SUNI, PP, Masyumi Baru, KAMI, MASYUMI, PID, PSII 1905 (Partai-

				partai Islam ini sangat heterogen: ada yang bersinkretis dengan tradisional Jawa, ada yang lebih berbau sosialis demokrat, dan ada yang Islam 'modern')
3.	Partai Katholik/Protestan	2	4,17	KRISNA, PKD. Disamping 2 parpol ini orang Katholik dan Protestan dan keturunan Cina membuat Partai PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa).
4.	"Berbau" Militer	3	6,25	PKP, IPKI, Partai MKGR (Partai-partai ini juga bersifat nasionalistis, dalam arti lebih mengarah format nation-state). Disamping itu beberapa jenderal purnawirawan "mempunyai parpol asuhan" yang bernama Partai Kebangsaan Merdeka.
5.	Berbasis Buruh	5	10,42	PBN, PPI, PRD, PSP, Partai SPSI (Partai-partai ini ada yang bersifat sosialis demokrat, nasionalis radikal, dan Islam).
6.	Bersifat Kebangsaan	6	12,5	Partai Kebangsaan Merdeka (PKM), Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Golkar, PILAR (Partai Pilihan Rakyat), PNBI (Partai Nasional bangsa Indonesia).
7.	Bersifat LSM	4	8,33	PADI (Partai Aliansi Demokrat Indonesia), PDR (Partai Daulat Rakyat), Partai MURBA, Partai Rakyat Indonesia (PARI)

Sumber: Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka dan Pusdeham, 2006, hal. 112.

Keempat, dalam pemilu yang lebih bebas dan adil (sebagaimana yang dijamin dalam UU Pemilu 1999) sedikit banyak mendorong menguatnya variabel

evaluasi kandidat dan isu-isu politik sebagai pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Kelima, pada pemilu 1999, kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak-hak politiknya semakin meningkat. Berbagai perbaikan politik yang dilakukan pemerintah, khususnya adanya kebebasan dan keterbukaan dalam menyalurkan aspirasi politik, dapat merangsang antusiasme masyarakat dalam berperilaku politik.

Keenam, pemilu 1999 bukan hanya diikuti oleh banyak partai politik, tetapi juga ditandai dengan menjamurnya organisasi pemantau Pemilu independen. Keterlibatan pemantau Pemilu yang independen ini, baik dari luar maupun dalam negeri, disebabkan pemerintah Habibie waktu itu menjamin keberadaan para pemantau independen. Sebab dengan kehadiran pemantau Pemilu yang independen, keluhan-keluhan kecurangan Pemilu sebagaimana yang biasa terjadi pada masa lalu dapat dikurangi. Pengalaman di banyak negara menunjukkan, kehadiran pemantau pemilu yang independen lebih menjamin terciptanya proses Pemilu secara *free and fair*.

Partai Keadilan (Sejahtera) tercatat sebagai salah satu partai politik peserta pemilihan umum 1999. Partisipasi Partai Keadilan (Sejahtera) dalam pemilihan umum pada masa transisi menuju demokratisasi ternyata telah memunculkan sebuah *trend* baru dalam hal berkampanye. Apabila beberapa partai dalam berkampanye hampir selalu diwarnai dengan kekerasan, saling menghujat, dan intimidasi kepada kelompok lain, maka Partai Keadilan (Sejahtera) mampu mencitrakan diri secara positif. Bahkan, selama masa

kampanye pemilu 1999 di Kabupaten Sidoarjo, Partai Keadilan (Sejahtera) dapat dikatakan tidak pernah melakukan kecurangan atau tindak kekerasan politik. berdasarkan riset tentang kekerasan politik pemilu 1999 di Jawa Timur yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Demokrasi dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, sama sekali tidak ditemukan kekerasan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan (Sejahtera).¹¹⁸ Untuk kasus kekerasan pemilu 1999 di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat 39 kasus. Dari temuan tersebut tidak satu kasus pun yang dilakukan oleh Partai Keadilan (Sejahtera).¹¹⁹

Selama hal kampanye pada pemilu 1999 di Kabupaten Sidoarjo, Partai Keadilan (Sejahtera) mampu mencitrakan diri sebagai partai yang santun, tertib, dan aman dari kerusuhan. Menurut Habibul Mu'iz, hal ini dikarenakan ada kebijakan saat kampanye, yang biasa disebut dengan etika kampanye, yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah.¹²⁰ Etika tersebut antara lain:¹²¹

1. Dalam menyampaikan program-programnya, partai harus melakukannya dengan santun dan baik
2. Kampanye harus dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu pihak lain
3. Tetap menjada *ukhuwah Islamiyah*

¹¹⁸ Lihat Aribowo, dkk., *Kekerasan Politik Pemilu 1999*. Surabaya: Hipotesa bekerjasama dengan Kelompok Kerja Demokrasi dan Pengembangan HAM Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Unair, 2000. halaman lampiran.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Dewan Syariah merupakan lembaga yudikatif. Anggota Dewan Syariah mayoritas adalah alumni pendidikan agama dari timur Tengah. Lembaga ini, saat itu, diketuai oleh Dr. H. Salim Segaf, alumni Universitas Madinah. Sedangkan Wakilnya adalah Dr. H. Daud Rasyid, alumni Universitas Kairo. Wawancara dengan Habibul Mu'iz, 17 April 2006.

¹²¹ *Ibid.*

4. Tidak sombong dan memuji diri sendiri
5. Kewajiban utama tidak boleh dilupakan
6. Harus mampu memberi contoh yang baik
7. Harus mampu melakukan dan memberi sesuatu yang baik bagi bangsa
8. Hindari memaksakan kehendak
9. Tidak memberikan janji yang sulit untuk dipenuhi
10. Dilarang mencaci dan menghina kelompok lain
11. Melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas.

Dengan demikian tidak mengherankan apabila Partai Keadilan (Sejahtera) mampu menampilkan diri sebagai partai yang santun dan damai. Dalam setiap kampanye, ribuan massa Partai Keadilan (Sejahtera) selalu hadir. Yang menarik untuk dicermati adalah peserta kampanye ini adalah massa riil Partai Keadilan (Sejahtera), bukan massa yang sekedar ikut-ikutan kampanye. Helmi Musa mengatakan:

“...Begitulah partai kami. Simpatisan yang hadir dalam kampanye adalah massa riil partai. Memang tidak sebanyak partai-partai lain. Tapi belum tentu semua itu adalah massa riil partai tersebut. Semua ini karena Partai Keadilan melarang dengan tegas melakukan politik uang.”¹²²

Selain tertib, ciri lain dari kampanye Partai Keadilan (Sejahtera) adalah aman. Merupakan konsekuensi logis, bahwa kampanye yang tertib, maka akan melahirkan kampanye yang aman. Sepanjang kampanye Partai Keadilan (Sejahtera) tidak pernah ada korban sia-sia akibat kecelakaan dalam konvoi kendaraan peserta kampanye. Terkait dengan kampanye Partai Keadilan (Sejahtera) yang aman dan tertib, Helmi Musa mengatakan:

¹²² Wawancara dengan Helmi Musa, 15 April 2006

“Massa Partai Keadilan sangatlah tertib dalam berkampanye. Tertibnya dapat kita lihat dari pesertanya yang membawa motor, pasti suara kendaraannya tidak ada yang meraung-raung, karena memang knalpotnya ada. Banyak juga ibu-ibu yang menggendong anaknya yang masih bayi. Ini bukti bahwa kampanye Partai Keadilan aman dan tertib.”¹²³

Lebih lanjut, Habibul Mu’iz berpendapat:

“Partai kita adalah partai Islam. Jadi segala perilakunya harus yang Islami. Dalam kampanye pun nilai-nilai Islam tidak boleh diabaikan. Rapi, tertib, tidak merugikan kelompok di luar kita, adalah nilai-nilai yang selalu kami pegang. Bukti bahwa kita selalu rapi dan tertib dapat disaksikan dalam barisan kita yang selalu tertata laksana barisan sholat. Maka ikhwan dan akhwat tidak boleh bercampur. Tidak hanya itu, taat peraturan juga merupakan identitas kita. Kendaraan tidak pernah dinaiki simpatisan melebihi kapasitas.”¹²⁴

Partisipasi Partai Keadilan (Sejahtera) dalam pemilu 1999 ternyata tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari pemilih. Meskipun pencitraan partai yang positif, ternyata Partai Keadilan (Sejahtera) tidak mendapatkan suara yang cukup signifikan. Di akhir penghitungan, Partai Keadilan (Sejahtera) hanya mampu meraup 1.436.565 suara (1,6 %). Sedangkan untuk di Kabupaten Sidoarjo, Partai Keadilan (Sejahtera) hanya mampu meraih 4.386 suara (0,52 %). Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut:

Pertama, Partai Keadilan (Sejahtera) dikenal sebagai partai yang eksklusif. Simpatisan dan pengurus partai berasal dari para aktivis dakwah dan mereka yang aktif dalam kajian-kajian kelompok tarbiyah. Sehingga di wilayah Sidoarjo yang mayoritas penduduknya berafiliasi ke Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kurang berminat pada Partai Keadilan (Sejahtera). Belum lagi kekhasan yang dimiliki oleh kelompok tarbiyah yang semakin menunjukkan ke-eksklusif-an

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Wawancara dengan Habibul Mu’iz, 17 April 2006.

mereka. Pada umumnya, pendukung Partai Keadilan (Sejahtera) apabila dia laki-laki maka dia akan berpakaian rapi, baik berupa kemeja, baju *koko*, atau kaus lengan panjang berlambang Partai Keadilan. Hampir tidak pernah kita jumpai pendukung Partai Keadilan (Sejahtera) yang berpakaian sembarangan sehingga menimbulkan kesan *urakan*. Tidak hanya itu, pendukung Partai Keadilan (Sejahtera) yang laki-laki kebanyakan berjenggot dan sepanjang kampanye atau rapat akbat partai selalu meneriakkan *Allahu Akbar*. Sedangkan untuk pendukung perempuan Partai, dapat dipastikan kalau mereka berjilbab dan menggunakan baju muslim terusan. Seringkali warna putih menjadi warna favorit. Ke-eksklusifan ini diakui oleh Agus Suprianto:¹²⁵

“Beberapa kalangan memang menilai kami saat itu adalah kelompok yang eksklusif. Tapi memang inilah adanya. Bukankah setiap kelompok harus memiliki identitas sendiri? Memang kami gagal total dalam pemilu 1999. Tetapi situasinya telah berubah pada pemilu 2004. Masyarakat sudah mulai terbuka terhadap kami.”

Kedua, label Partai Keadilan (Sejahtera) sebagai partai kalangan terdidik perkotaan menjadikan masyarakat kebanyakan yang mendapatkan pendidikan *pas-pasan* merasa *minder* untuk bergabung dalam Partai Keadilan (Sejahtera). Hal ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan Partai Keadilan (Sejahtera) boleh dibilang tidak sukses pada pemilu 1999.

Untuk konteks Sidoarjo, faktor ini tentu dapat dengan mudah kita pahami dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Sidoarjo belum banyak yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Selain itu, sebagian besar wilayah Sidoarjo adalah pedesaan. Karena kampanye Partai Keadilan (Sejahtera)

¹²⁵ Wawancara dengan Agus Suprianto, 17 April 2006.

masih terpusat di wilayah tengah kota, tentu ini bukan sebuah strategi kampanye yang bijaksana. Dan hasil penghitungan suara menunjukkan hal itu. Berikut hasil penghitungan suara Partai Keadilan (Sejahtera) di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 10
Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera
pada Pemilu Legislatif 1999 dan 2004 di Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Pemilu 1999	Pemilu 2004
1.	Sidoarjo	553	5.305
2.	Buduran	216	1.391
3.	Candi	185	2.824
4.	Tanggulangin	86	1.848
5.	Porong	62	1.036
6.	Tulangan	82	911
7.	Tarik	347	1.060
8.	Prambon	83	1.153
9.	Krian	174	1.967
10.	Balombendo	147	1.417
11.	Krembung	135	1.140
12.	Jabon	29	336
13.	Wonoayu	133	1.495
14.	Taman	478	4.590
15.	Sukodono	104	1.770
16.	Waru	723	6.346
17.	Gedangan	335	2.299
18.	Sedati	193	1.887
	TOTAL	4.065	38.775

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo

Ketiga, dengan menggunakan asas Islam, ada kekhawatiran dalam masyarakat bahwa Partai Keadilan (Sejahtera) akan mendirikan negara Islam. Sehingga bagi muslim yang tidak menghendaki adanya negara Islam tentu

enggan menyalurkan aspirasinya melalui partai ini. Namun Syarif Muhtarom memiliki pendapat yang berbeda.¹²⁶

“Partai Keadilan itu kan memang partai Islam. Hanya saja kita tidak serta merta mendirikan negara Islam. Tidak itu. Bagi kita yang utama adalah menegakkan keadilan di setiap aspek kehidupan. Entah itu secara individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kemudian keadilan tersebut dijadikan sebagai modal demokratisasi di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Jadi kami menganut demokrasi. Demokrasi yang berkeadilan. Mungkin waktu kampanye dan sosialisasi partai yang terlalu singkat sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu hal itu. Terbukti pada pemilu 2004 kami memperoleh suara yang lumayan. Berarti selama rentang waktu itu, kita berhasil menyosialisasikan partai kita ke masyarakat sehingga kita memiliki dua keder partai yang duduk di dewan Sidoarjo.”

Meskipun demikian, ada hal positif dari Partai Keadilan (Sejahtera). Paling tidak dengan aksi kampanye yang aman, tertib, dan damai banyak kalangan yang simpati, tidak terkecuali media massa. Sehingga dari sisi opini dan pemberitaan, tentu ini sangat menguntungkan. Adanya solidaritas yang kuat antar pendukung partai tentu menjadi sebuah kemudahan bagi partai untuk berkonsolidasi dan merapatkan barisan.

Satu lagi hal positif dari Partai Keadilan (Sejahtera) adalah kemampuan mereka untuk mempertahankan sikap moderat. Contoh jelas dari karakteristik moderat Partai Keadilan (Sejahtera) adalah sikap partai ini dalam kasus Piagam Jakarta. Dalam Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2000 lalu, ramai wacana untuk mengamandemen UUD 1945 dengan Piagam Jakarta, yang terdiri dari tujuh kata yaitu “...dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hampir semua partai yang berasaskan Islam memperjuangkan ide

¹²⁶ Wawancara dengan Syarif Muhtarom, 19 April 2006.

amandemen UUD 1945 dengan Piagam Jakarta tersebut, kecuali Partai Keadilan (Sejahtera). Hal ini tentu menyulut kontroversi. Sebagai partai yang berbasis Gerakan Tarbiyah tentu penolakan tersebut mengundang tanda tanya politisi Islam lainnya. Kontroversi itu kemudian dijawab oleh salah seorang tokoh Partai Keadilan (Sejahtera) dengan kalimat sebagai berikut:¹²⁷

“menyangkut Piagam Jakarta sebenarnya perlu didudukan secara benar. Paling tidak ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Pertama, saya menghormati fraksi-fraksi yang mengusulkan teks Piagam Jakarta itu dimasukkan ke dalam pasal 29 (UUD 1945). Menghormati dalam arti tulus, sungguh-sungguh dan konsisten. Karena dengan begitu, di kalangan partai-partai Islam terjadi konsolidasi internal, bahkan masyarakat dan Negara. Mudah-mudahan ini tidak politicking. Bukan sekedar komoditi politik atau politik pencitraan. Hanya sekedar (supaya) dianggap partai Islam, karena hal itu bisa mengecewakan umat dan terjebak pada firman Allah ‘kaburo maktan indallahi antaquulu ma la taf’aluun’ (amat besar kebencian di sisi Allah kalau kamu (hanya) mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan).

Cuma di sini ada beberapa catatan. Pertama, yang diutamakan adalah substansinya, yaitu bagaimana negara dan masyarakat ini memiliki komitmen yang kuat pada nilai-nilai syariat Islam secara keseluruhan. Maka persoalannya bukan persoalan redaksi Piagam Jakarta an sich. Artinya harus dilihat lebih luas. Kan ada opini seolah-olah mereka yang tidak atau belum menerima teks Piagam Jakarta itu dianggap anti syariat. Dan sebaliknya, seolah-olah yang setuju dengan teks Piagam Jakarta itu setuju dengan keseluruhan syariat. Padahal ini belum tentu. Jika hal ini yang kita dekati maka kita bisa lihat bahwa yang tidak setuju teks Piagam Jakarta bukan berarti tidak komitmen dengan syariat Islam. Contohnya PK. Anda bisa buktikan komitmen PK terhadap nilai-nilai Islam. Bandingkan dengan partai-partai lain. Juga dengan Muhammadiyah dan NU. Berpuluh-puluh tahun mereka komitmen dengan syariat. Mereka, para tokohnya, mungkin tidak setuju dengan teks Piagam Jakarta, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak setuju dengan syariat. Dan untuk individu-individu tertentu seperti di Partai Golkar dan TNI ada yang komitmennya terhadap syariat kuat, Cuma mereka tidak setuju dengan teks Piagam Jakarta.

¹²⁷ Wawancara dengan H. Mutammimul Ula, SH (Anggota DPR RI Fraksi Reformasi). “Persoalannya Bukan Teks Pragam Jakarta An Sich, Tapi...”, dalam Suara Keadilan, Edisi 08/1-15 September 2000, hal 4-5, seperti yang kutip oleh Ali Sard Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta:Teraju, 2002, hal 248-251.

Yang kedua, yang diutamakan adalah substansi maka redaksinya bisa bermacam-macam menurut ijtihad bahasa. Bisa redaksi yang ada sekarang (pasal 29 UUD 1945; "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"). Itu juga peluang kita untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam masih luas. Bisa juga teks yang diajukan oleh Fraksi Reformasi yaitu setiap warga negara melakukan kewajibannya sesuai dengan agama masing-masing. Dan itu ada rujukannya yaitu sesuai dengan Piagam Madinah. Bisa juga dengan redaksi lain yang lebih tegas seperti melaksanakan kewajiban Islam bagi pemeluknya. Penekanan disini bukan melaksanakan syariat Islam. Tapi Islam secara keseluruhan. Nah, ini kan persoalan redaksi. Jadi kita jangan mensakralkan suatu kalimat tertentu.

Yang ketiga, jika yang diutamakan adalah substansi yaitu keseluruhan ajaran Islam maka gerakan untuk menegakkan syariat itu bisa dengan berbagai cara. Seperti *ishlahul fardhi* (memperbaiki individu), sebagaimana para ahli dakwah mengatakan; "tegakkan syariat Islam dalam dirimu. niscaya Islam akan tegak di negaramu". Kedua, *ishlahul bait* (memperbaiki keluarga). Ketiga, gerakan sosial seperti Muhammadiyah dan NU. Keempat, gerakan sosial dan politik. jadi gerakan Islam masuk dalam elemen-elemen yang kita lihat sekarang seperti Amien Rais dan Gus Dur. Kan nuansa Islam, sudah mulai masuk, meskipun belum powerfull. Kelima, melalui legislasi yaitu memasukkan elemen-elemen Islam dalam perundang-undangan DPR seperti yang sudah berjalan saat ini yaitu UU Zakat, UU Perbankan, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama. Jadi lima cara ini cukup efektif untuk mendekatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, hal ini mengurangi tingkat resistensi atau alergi dikalangan mereka yang selama ini takut dengan syariat Islam. Nah, baru yang terakhir perjuangan konstitualisme. Perjuangan konstitualisme ini memerlukan persyaratan yang sangat berat yaitu memasukan teks-teks Islam ke dalam konstitusi. Pengalaman seluruh negeri Muslim boleh dibilang belum ada yang berhasil memperjuangkan konstitualisme melalui demokrasi. Turki digebuk, Aljazair yang sudah menang pemilu digebuk. Indonesia sendiri dengan Piagam Jakarta dan konstituante '55 dicabut. Apalagi di Indonesia perubahan konstituante itu harus quorum 2/3 dan ini rumit. Ibaratnya Golkar dan PDI-P gabung baru bisa lolos. Jadi perjuangan konstitusionalisme ini syaratnya harus didukung oleh publik secara keseluruhan. Karena itu, syaratnya basis massa harus mendukung all out.

Kesimpulannya adalah kita sangat setuju dengan penegakan syariat dilaksanakan pada tingkat ketatanegaraan. Tetapi ini harus menjadi agenda umat bukan agenda partai per partai. Sebab kalau tidak menjadi agenda umat secara keseluruhan, peluang kalahnya besar dan umat menjadi kalah. Tapi kalau agenda umat maka seluruh ormas Islam yang

memiliki basis massa besar bersatu dengan kekuatan politik di DPR/MPR merumuskan satu rumusan yaitu rumusan yang paling mendekati ideal, baik normative maupun realitas masyarakat. Itulah yang harus diperjuangkan dalam perjuangan konstitusi tahun 2002.

IV. 2. Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum 2004

Pada sub bab terdahulu dipaparkan bahwa Partai Keadilan (Sejahtera) mengalami kegagalan pada pemilu 1999 sehingga gagal melewati jerat *electoral threshold* 2 %. Partai Keadilan (Sejahtera) sempat menolak menandatangani hasil pemilu tersebut dengan argumen bahwa politik uang (*money politics*), kecurangan, dan intimidasi masih mewarnai pemilu 1999. Akan tetapi setelah ada pengakuan resmi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa pemilu 1999 masih jauh dari jujur dan adil, baru Partai Keadilan (Sejahtera) menandatangani hasil pemilu tersebut. Segera setelah itu Partai Keadilan (Sejahtera) melakukan konsolidasi dan evaluasi tentang kegagalan pada pemilu 1999. Salah satunya dengan bergabung pada Partai Keadilan Sejahtera pada 17 April 2003 untuk mempersiapkan diri berpartisipasi pada Pemilu 2004. Sub bab ini akan mendiskripsikan kiprah Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004.

Pemilu 2004 memiliki nilai strategis sekaligus tantangan bagi partai politik peserta pemilu. *Pertama*, pemilu 2004 akan memilih lima lembaga sekaligus, yaitu DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, pemilu 2004 menjadi ajang pembuktian eksistensi partai-partai yang telah merubah nama setelah mereka gagal dalam pemilu 1999. Sebanyak 24 partai berpartisipasi dalam pemilu 2004. Salah satu dari 24 partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera, metamorfosis dari Partai Keadilan.

Saat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu legislatif pada tanggal 5 Mei 2004, Partai Keadilan Sejahtera mencatat prestasi luar biasa dengan meraup lonjakan suara dan kursi untuk DPR RI. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera di luar dugaan mampu menduduki posisi pertama di DKI Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera mampu meraup 45 kursi di DPR RI yang disumbangkan oleh 8.325.020 suara pemilih, bandingkan dengan dukungan terhadap partai ini pada pemilu 1999 lalu yang “hanya” 1.436.563 suara (lihat tabel 8).

Ada beberapa fenomena menarik Partai Keadilan Sejahtera yang dapat dikedepankan untuk menganalisa meningkatnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004.

Pertama, Partai Keadilan Sejahtera mampu melakukan kaderisasi secara konsisten dengan disertai penyempurnaan-penyempurnaan dalam metode kaderisasi. Apabila pada awal perkembangannya, kaderisasi hanya dilakukan di kampus-kampus, aktivitas pembinaan dan kaderisasi dilakukan secara eksklusif, maka aktivitas kaderisasi dilakukan secara terbuka dan daya jangkauannya tidak hanya dilakukan kepada kalangan mahasiswa, tetapi juga diberikan kepada buruh, petani, pelajar, dan kelompok masyarakat lainnya. Metode dan pendekatan di tingkat kelompok-kelompok masyarakat itu pun berbeda-beda mengikuti sasaran masing-masing. Menurut Habibul Mu'iz, ini dilakukan untuk menghilangkan kesan di masyarakat bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai orang kota yang berpendidikan tinggi.¹²⁸ Lebih jauh Mu'iz mengatakan:¹²⁹

¹²⁸ Wawancara dengan Habibul Mu'iz, 17 April 2006.

"...tidak hanya itu (kaderisasi di kalangan mahasiswa dan pelajar), kaderisasi dan pembinaan juga kami lakukan pada kalangan muda secara umum. Tidak lagi dalam kajian-kajian agama. Pendekatan kami lakukan dengan pelatihan-pelatihan kerja yang diselingi dengan game-game yang menanamkan nilai-nilai Islam".

Dengan model kaderisasi seperti ini, tidak heran apabila Partai Keadilan Sejahtera sudah mulai masuk ke desa-desa. Di kabupaten Sidoarjo, hasil penghitungan suara pemilu legislatif menunjukkan peningkatan suara yang luar biasa (lihat tabel 10).

Kedua, sebagai akibat dari derasnya informasi dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat mengakibatkan adanya perubahan dalam pandangan umat Islam. Apabila selama ini, sebagian kelompok memandang formalisasi syariat Islam sebagai sesuatu yang penting dan dalam penyapaiannya dilakukan dengan demonstrasi yang tidak simpatik mengakibatkan pandangan miring masyarakat. Dengan demikian terbentuk suatu kondisi di mana simbol-simbol Islam dengan beragam bentuk formalisasi sudah tidak penting lagi. Masyarakat lebih menginginkan Islam sebagai ruh atau substansi kehidupan masyarakat. Penjelasan yang dapat digunakan untuk menjawab fenomena Partai Keadilan Sejahtera ini adalah kaum muslimin cenderung lebih menginginkan untuk menjadikan Islam sebagai dasar etika sosial sehingga nilai-nilai Islam dapat mempengaruhi dan mewarnai kehidupan bangsa ini.

Kondisi seperti ini yang dapat dicermati pada fenomena kenaikan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004. Para juru kampanye Partai Keadilan Sejahtera tidak menjual isu-isu yang sifatnya ideologis Islam, seperti penegakan

¹²⁹ *Ibid.*

syariat Islam. Juru kampanye Partai Keadilan Sejahtera lebih membahasakannya ke dalam bahasa-bahasa yang universal. Misalnya isu anti-KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dibahasakan dengan “Bersih dan Peduli”. Semua ini tidak sekedar retorik dan janji kampanye saja. Selama rentang waktu 1999-2004, aktivis Partai Keadilan Sejahtera mampu membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wakil-wakil mereka di parlemen secara terang-terangan mengembalikan berbagai dana yang tidak jelas asal-usulnya. Ribuan posko peduli di berbagai desa di seluruh pelosok tanah air juga merupakan bukti bahwa Partai Keadilan Sejahtera mampu melakukan sesuatu yang riil bagi masyarakat.

Ketiga, Partai Keadilan Sejahtera sudah teruji dalam lima tahun terakhir lewat aksi para politikusnya di panggung parlemen serta simpatisan-simpatisan partai dalam menyuarakan aspirasinya dengan kegiatan dan ekspresi yang sepi dari anarkisme.

Keempat, kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera berbeda dengan karakter di dalam partai-partai lain seperti PDI-Perjuangan, PKB, PAN dan Partai Demokrat yang sangat tergantung pada figur-figur tertentu. Dapat kita bayangkan misalnya, Partai Demokrat tanpa sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan PDI, Partai Golkar atau PPP masih diuntungkan dengan keberadaan pendukung sisa kejayaan masa lalu.

Kelima, Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai alternatif. Para pemilih memandang PDIP dan Megawati yang menjalankan roda pemerintahan telah gagal dalam merealisasikan janji-janji mereka saat kampanye. Bagaimana pemilih bisa tetap percaya pada PDIP dan Pemerintahan Megawati ketika PDIP

yang memproklamkan diri sebagai partai *wong cilik* ternyata melakukan penggusuran kepada pedagang-pedagang kaki lima dan membuat kebijakan yang mengakibatkan naiknya harga beberapa bahan makanan pokok.

Kondisi ini ternyata mampu “dimanfaatkan” dengan baik oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan terjun langsung ke daerah-daerah bencana. Tidak hanya itu, relawan-relawan Partai Keadilan Sejahtera rela tinggal beberapa minggu untuk memberi bantuan kepada korban banjir, gempa dan tanah longsor. Inilah yang mampu mendongkrak perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2004.

IV. 3. Positioning Partai Keadilan Sejahtera Pasca Pemilu 2004

Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang luar biasa pada pemilu legislatif 2004 dapat diartikan sebagai kemenangan “partai alternatif” yang merebut hati para pemilih rasional dan barisan pemilih yang merasa dikecewakan oleh partai tertentu. Mereka menggunakan hak pilih dengan memilih Partai Keadilan Sejahtera karena mereka memiliki harapan yang besar kepada partai ini untuk mewujudkan Indonesia Baru, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah terbukti “Bersih dan Lebih Peduli”.

Partai Keadilan Sejahtera kemudian mengambil langkah oposisi. Keputusan ini dikeluarkan oleh Majelis Syuro setelah melakukan musyawarah pada 24-25 April 2004. Keputusan ini diambil oleh Majelis Syuro agar Partai Keadilan Sejahtera dapat melaksanakan amanah konstituennya dengan berkonsentrasi pada perjuangan di legislatif.

Laode Ida menyebut keputusan ini sebagai “Inovasi politik Partai Keadilan Sejahtera yang menarik, elegan dan produktif, baik bagi kepentingan perkembangannya sendiri maupun untuk pembangunan politik di Indonesia.” Ida kemudian mendeskripsikan tiga alasan sehubungan dengan *positioning* Partai Keadilan Sejahtera pasca pemilu legislatif yaitu:¹³⁰

“Pertama, keputusan itu merupakan bagian dari upaya untuk tetap memelihara konsistensi dan citranya dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih. Karena, memberikan dukungan terbuka terhadap figur capres dan cawapres yang masih diragukan atau kontroversial di mata public hanya akan merugikan citranya sendiri yang sudah dengan susah payah dibangun dalam lima tahun terakhir. Tepatnya, PKS bias terjebak alam orientasi perebutan kekuasaan kursi eksekutif, yang sekaligus akan dituduh mulai mengincar materi.

Kedua, dengan memosisikan diri sebagai oposisi, PKS akan memberikan pembelajaran demokrasi bagi para politisi dan masyarakat. Kalau selama ini kita tidak memiliki partai oposisi di parlemen, karena umumnya para politisi hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan di eksekutif, atau walaupun bersikap kritis di parlemen (DPR/DPRD) biasanya para politisinya memiliki tendensi untuk memperoleh kompensasi politis dan materi dari pihak yang dikritiknya; maka PKS dapat mengembangkan paradigma baru bahwa oposisi memiliki pengaruh yang substantif untuk memberikan arah bagi para pemegang kendali di eksekutif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Ketiga, meskipun perolehan suara PKS meningkat dibandingkan lima tahun yang lalu, secara kuantitatif masih belum signifikan untuk bertarung memperebutkan kursi kekuasaan di eksekutif. PKS hanya menang di DKI Jakarta, itu pun tidak mayoritas. Ini artinya, kalau berkoalisi, PKS hanya dianggap sebagai pendukung atau pelengkap penderita, di mana capres/cawapres yang didukungnya juga belum tentu menang. Atau, walaupun pihak yang didukungnya menjadi pemenang dan kemudian ternyata tidak bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka PKS akan terbawa dalam pencitraan negative pemerintahan yang didukungnya itu. Semua ini jelas tak akan menguntungkan bagi PKS yang dimotori oleh kalangan Islam modernis terdidik yang berwatak progresif-demokratis.

Tetapi, kalau PKS berada di luar kekuasaan eksekutif dan menjadi kekuatan oposisi dengan tetap menunjukkan konsistensinya dalam motto ‘peduli dan bersih’, maka itu bisa jelas akan merupakan kampanye

¹³⁰ *Gatra*, No. 25 tahun X, 8 Mei 2004 seperti yang dikutip oleh Kamarudin, “Partai Keadilan Sejahtera: Ikon Baru Politik Indonesia”, dalam *Tashwirul Afkar*, No. 16 tahun 2004, hal. 16

positif selama lima tahun ke depan, dan itu memperbesar peluangnya untuk terus menambah perolehan suara dalam pemilu.”

Mengomentari hal ini, Agus Suprianto berpendapat:¹³¹

“Oposisi adalah sesuatu yang tepat bagi partai. Dengan terus istiqamah menjalankan program partai dan terus berdakwah lewat parlemen dengan cara menunjukkan citra yang positif, saya yakin kita akan mendapatkan suara yang meningkat pada pemilu berikutnya.”

Dengan demikian, Partai Keadilan Sejahtera akan mampu menunjukkan kiprahnya yang positif. Pada saat seluruh partai berlomba-lomba untuk berkoalisi, Partai Keadilan Sejahtera lebih berkonsentrasi pada posisi oposisi. Ini adalah sebuah sikap yang elegan dan menarik perhatian publik. Dan, Partai Keadilan Sejahtera merupakan Partai Masa Depan.



¹³¹ Wawancara dengan Agus Suprianto, 17 April 2006

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, ada satu hal yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan catatan penting dalam bagian penutup ini, yaitu fenomena Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu 2004 yang lalu.

Keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera meraup 8 % suara (45 kursi di DPR RI) merupakan sesuatu hasil yang spektakuler. Sebagai partai yang tidak lolos *electoral treshold* 2 % pada pemilu 1999, Partai Keadilan Sejahtera mampu melakukan konsolidasi internal dengan baik. Ada beberapa hal yang menarik dengan fenomena kebangkitan Islam politik, yang direpresentasikan Partai Keadilan Sejahtera, ini:

Pertama, hasil spektakuler ini tidaklah diraih dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Aktivis Partai Keadilan Sejahtera sudah merintisnya semenjak awal 1980-an. Kemunculan kelompok anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari dan mengamalkan Islam, sebagai jawaban dari tekanan politik yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada saat itu terhadap umat Islam.

Sikap tidak bersahabat pemerintah Orde Baru terhadap mahasiswa dalam bentuk penerbitan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus umumnya ditolak oleh kalangan mahasiswa. Respon langsung dari mahasiswa adalah dengan mendirikan kelompok-kelompok diskusi sebagai cara melawan kekuasaan Orde Baru. Bagi kelompok mahasiswa muslim, masjid dan mushalla kampus dimanfaatkan

sebagai ruang publik untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sedang aktual. Sehingga masjid dan mushalla kampus kemudian menjadi basis aktivistas kalangan mahasiswa muslim.

Beberapa tahun kemudian, gelombang dukungan dan aktivitas dari kelompok mahasiswa Islam ini mulai merambah berbagai strata kehidupan. Yaitu dengan mendirikan lembaga pendidikan Nurul Fikri dan Al-Hikmah, lembaga dakwah Khairu Ummah, penerbitan majalah Islam Sabili dan Ummi, serta lembaga kajian SIDIK Foundation. Bahkan mereka juga mendeklarasikan berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang juga berperan dalam me-*lengser*-kan kekuasaan Soeharto (Orde Baru).

Jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 telah membuka ruang liberalisasi politik di negeri ini. Kelompok mahasiswa Islam, atau yang biasa disebut Gerakan Tarbiyah, kemudian mendirikan Partai Keadilan (Sejahtera) untuk berpartisipasi dalam pemilu 1999 (partai tersebut kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera, setelah gagal lolos *electoral threshold* 2 %). Dengan demikian, Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang memiliki basis massa kuat dan sudah terkonsolidasi sejak lama.

Kedua, Partai Keadilan Sejahtera mampu menampilkan diri sebagai partai alternatif. Partai Keadilan Sejahtera mampu tampil baik dan konsisten dalam kurun lima tahun sebelum pemilu 2004, melalui kiprah kader mereka di parlemen yang memesonakan publik dengan menolak segala macam aliran dana yang tidak jelas asal dan manfaatnya. Tidak hanya itu, mereka mampu menunjukkan bagaimana cara berdemokrasi dengan tertib, damai, dan jauh dari kekerasan.

Berbagai aksi demonstrasi yang mereka gelar dengan dihadiri ribuan massa selalu berlangsung aman, damai dan tertib.

Selain beberapa hal di atas, aktivis Partai Keadilan Sejahtera juga mampu mengaplikasikan janji-janji politik mereka yang ‘bersih dan lebih peduli’ dengan mendirikan posko Keluarga Keadilan, posko santunan korban bencana alam, dan segala bentuk kegiatan sosial lainnya yang menjadikan mereka semakin mendapat simpati dari masyarakat. Menariknya, semua itu dilakukan secara kontinyu jauh sebelum masa kampanye berlangsung.

Ketiga, meskipun Partai Keadilan Sejahtera dengan jelas menyebutkan sebagai Partai yang berbasas Islam, namun partai ini tidak kemudian meniscayakan formalisasi syariat Islam. Para juru kampanye Partai Keadilan Sejahtera tidak menjual isu-isu yang sifatnya ideologis Islam, seperti penegakan syariat Islam. Juru kampanye Partai Keadilan Sejahtera lebih membahasakannya ke dalam bahasa-bahasa yang universal. Misalnya isu anti-KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dibahasakan dengan “Bersih dan Peduli”. Semua ini tidak sekedar retorik dan janji kampanye saja. Selama rentang waktu 1999-2004, aktivis Partai Keadilan Sejahtera mampu membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wakil-wakil mereka di parlemen secara terang-terangan mengembalikan berbagai dana yang tidak jelas asal-usulnya. Ribuan posko peduli di berbagai desa di seluruh pelosok tanah air juga merupakan bukti bahwa Partai Keadilan Sejahtera mampu melakukan sesuatu yang riil bagi masyarakat. Bagi Partai Keadilan Sejahtera, yang terpenting adalah bagaimana Islam mampu menjadi ruh atau substansi kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, apabila Partai Keadilan Sejahtera mampu menjaga konsistensinya, penulis memiliki keyakinan bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan menjadi partai besar. Selain itu Partai Keadilan Sejahtera akan menjadi ikon kebangkitan Islam politik di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Zainal Abidin. *Peta Politik Islam Pasca-Soeharto*, Jakarta:LP3ES, 2003
- Amal, Ichlasul (peny.), *Teori-teori Politik Mutakhir Partai Politik*, cet. II, Yogyakarta:Tiara Wacana, 1996.
- Aribowo, dkk. *Kekerasan Politik Pemilu 1999*, Surabaya:Hipotesa bekerjasama dengan Kelompok Kerja Demokrasi dan Pengembangan HAM Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Unair, 2000.
- Aribowo, bahan perkuliahan Gerakan Sosial dan Politik, tidak diterbitkan, tanpa tahun.
- Asfar, Muhammad. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya:Pustaka Eureka dan Pusdeham, 2006.
- Azra, Azyumardi. "Islam Politik pada Masa Pasca-Soeharto", kata pengantar dalam A. M. Fatwa, *Satu Islam Multipartai*, Bandung:Mizan, 2000.
- Azra, Azyumardi. "Islam Politik dan Islam Kultural: Islam Pasca-Soeharto", dalam Arief Subhan (peny.), *Indonesia Dalam Transisi Memuji Demokrasi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999.
- Al-Banna, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, jilid II, Solo:Era Intermedia, 2001.
- Basyaib, Hamid dan Abidin, Hamid (penyuting), *Mengapa Partai Islam Kalah?*, Jakarta: ALVABET, 1999.
- Budiarjo, Miriam. *dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. XIII, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta:Sinar Harapan, 1986.
- Effendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta:Galang Press, 2001.
- , *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta:Paramadina, 1999.
- Esposito, John L. (ed.), "Pendahuluan" dalam *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*, Jakarta:Bulan Bintang, 1986.

- Fatah, Eep Saefullah. "Masa Depan Politik Islam: Dari Pusaran Menuju Artus Balik", pengantar dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Fatwa, A. M. "Tanjung Priok Berdarah: Pergulatan Antara Islam dan Kekuasaan", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Furkon, Aay Muhammad. *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Gani, Soelistiyati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia, 1987.
- Huntington, Samuel P. *Cielombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 1995.
- Herdi. "Islam Politik dalam Kancah Demokrasi", dalam *Prisma*, 8 Agustus 1995.
- Kamaruddin. "Partai Keadilan Sejahtera: Ikon Baru Politik Indonesia" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar* No. 16 Tahun 2004.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kuntowijoyo, "Peta Politik bagi Umat Islam", dalam Hamid Basyaib dan hamid Abidin (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alfabet, 2000.
- Liddle, R. William. *Islam, Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, jilid I, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Manning, Chriss dan Diermen, Peter van "Perkembangan Mutakhir dan Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis: Suatu Tinjauan Umum", dalam Chriss Manning dan Peter van Diermen, *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Nazir, Moh. *Merode Penelitian*, Jakarta: Ghalia, 1988.
- Rahmat, Andi dan Najib, Mukhammad. *Gerakan Pertlawananan dari Masjid Kampus*, Surakarta: Purimedia, 2001.
- Rais, M. Amien. "Gerakan-gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya bagi Gerakan Islam Indonesia", *Prisma, Arah Baru Islam: Suara Angkatan Muda*, no. ekstra, 1984 tahun XIII.

- , "Menyelamatkan Agenda Reformasi" dalam Lukman Hakim (peny.), *Reformasi dalam Stagnasi*, Jakarta:Yayasan Al-Qur'an-Mukmin, 2001.
- Roy, Oliver. *Gagalnya Islam Politik*, Bandung:Serambi, tanpa tahun,
- Salim, Arskal. *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, Jakarta:Pusat Penelitian IAIN Jakarta, 1999.
- Sekilas Partai Keadilan*, penerbit DPP Partai Keadilan, cetakan pertama, 1998
- Singarimbun, Masri (ed.), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta:LP3ES, 1987.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:Grasindo, 1992
- Suryakusuma, Julia I. *Almanak Parpol Indonesia (API)*, Jakarta:API, 1999.
- Syamsudin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta:Logos, 2001.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta:Gema Insani Pres, 1997
- Yang Nyata dari PK Sejahtera*, Jakarta:Misykat Publication, hal. 33.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta:Teraju, 2002.
- Zainuddin, A. Rahman "Pemikiran Ilmu Politik" dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia, 1990.

Koran

Republika, 7 Juni 2004.

Wawancara

Wawancara dengan Helmi Musa, 11, 13 dan 15 April 2006.

Wawancara dengan Habibul Mu'iz, 13 April 2006.

Wawancara dengan Helmi Musa, 15 April 2006.

Wawancara dengan Agus Suprianto, 17 April 2006.

Wawancara dengan Syarif Muhtarom, 19 April 2006.

Wawancara dengan Ibnu Mubarak, 21 April 2006

Internet

http://www.kpu.go.id/peraturan_uu/peraturan_uu_list.php.

<http://www.kpu.go.id/sejarah/pemilu1999.shtml>.

<http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=art>

<http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=deklarasi&mn=3>.

